

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA
HIJAU (P2KH) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Purnama Sari T.



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA
HIJAU (P2KH) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
Purnama Sari T.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hasil Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bappeda untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung? dan apakah upaya yang dilakukan oleh Bappeda untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi evaluasi program pengembangan kota hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung terkait dari segi evaluasi kebijakan. Lokasi penelitian ini bertempat di Bappeda Kota Bandar Lampung, Distako Kota Bandar Lampung, BPPLH Kota Bandar Lampung dan Disbertam Kota Bandar Lampung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber dari informan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen berupa reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari pembahasan didapatkan berdasarkan fakta yang ada, pada indikator mengenai ketepatan, dapat dilihat bahwa masyarakat telah menikmati manfaat Program P2KH walaupun masih banyak Program P2KH yang belum terealisasi. Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Bappeda dalam pelaksanaan Program P2KH adalah melaksanakan agenda rapat koordinasi bulanan dan pelaporan ke Pemerintah Pusat di tiap tahunnya. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan RTH di Kota Bandar Lampung adalah membuat *vertical garden*.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Program P2KH yaitu mengoptimalkan sosialisasi pentingnya RTH dan Pelaksanaan Program P2KH kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. dan Pemberian arahan oleh Kementerian PU dalam memperjelas tugas masing-masing SKPD dan membahas kegiatan-kegiatan pengembangan yang sesuai dengan instansi masing-masing.

Kata kunci : evaluasi, pelaksanaan, program pengembangan kota hijau (P2KH)

ABSTRACT
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE GREEN CITY
DEVELOPMENT PROGRAM (P2KH) IN THE CITY OF
BANDAR LAMPUNG

By
Purnama Sari T.

This research aims to know the description of the results of the Green City Development Program (P2KH) in Bandar Lampung and to know the efforts taken by the Agency to improve open space Green (RTH) in the City of Bandar Lampung. The problem in this research is how the results of the Green City Development Program (P2KH) in the City of Bandar Lampung? And whether the efforts taken by the Agency to improve open space Green (RTH) in the City of Bandar Lampung?

This research with qualitative descriptive types. The focus of the research in this research includes the evaluation of the program the development of the city of hiju (P2KH) town Bandar Lampung related in terms of the evaluation policy. The location of this research located at Bappeda City of Bandar Lampung, Distako City of Bandar Lampung, BPPLH City of Bandar Lampung and Disbertam City Bnadar Lampung. The type of data that is used in this research is the primary data and secondary data. The source of the data in this research covers the source of informers and documentation. Data analysis techniques used consists of three components in the form of a reduction in data (*reduction*), presentation of data (*display data*), and the withdrawal of the conclusion.

The result of the discussion of the obtained berdasarkan the fact that there are, on the indicator on the accuracy, it can be seen that the community has been enjoying the benefits of the Program P2KH although still many Programs P2KH that have not yet been realized. The efforts carried out by the Agency in the implementation of the Program P2KH is implementing monthly coordination meeting agenda and reporting to the Central Government in each year. One of the efforts of the government to improve the RTH in the City of Bandar Lampung is making *vertical garden*.

Now the things that can be used as input and consideration in the implementation of the Program P2KH namely optimize the socialization of the importance of RTH and the implementation of the Program P2KH to society the City of Bandar Lampung. And the giving of the direction by the Ministry of PU in clarify duties each SKPD dam discusses the development activities in accordance with their respective institutions.

Key Words : evaluation, implementation, green city development program (P2KH)

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA
HIJAU (P2KH) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Purnama Sari T.

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

pada

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH) DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Purnama Sari T**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041079

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

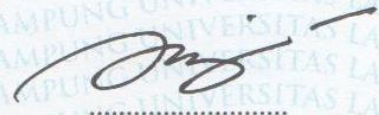
Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



Penguji Utama

: **Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarifet Makhya

NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Maret 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 06 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



Purnama Sari T

NPM 1216041079

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Purnama Sari T, lahir di Kotabumi, pada tanggal 16 Maret 1995. Penulis merupakan anak Ke-lima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Hi. Johansyah Tamin dan Ibu Hj. Nurmah.

Memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak – Kanak (TK) Tunas Harapan Kotabumi Lampung Utara tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2006 menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Islam Ibnurusyd. Selanjutnya pada tahun 2009 menyelesaikan pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 7 Kotabumi Lampung Utara. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 3 Kotabumi Lampung Utara.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis diterima melalui Jalur Undangan dan tergabung dalam himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada tahun 2015 di pertengahan bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang selama 40 hari.

MOTTO

- ❖ Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat
(Winston Churchill)
- ❖ Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga dirinya agar tidak tertidur dari kegelapan
(Richard Wheeler)
- ❖ Bakat akan terbentuk dalam gelombang kesembuyian dan watak akan terbentuk dalam riak besar kehidupan
(Goethe)
- ❖ Rahasia terbesar dalam mencapai kesuksesan adalah tidak ada besar dan siapapun yang menginginkan kesuksesan maka berusahalah dengan bersungguh-sungguh
(Purnama Sari T)

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT
Ku persembahkan karya sederhana ini untuk:*

Buya dan Umi dan kakakku tercinta

*Yang selalu memberikan dukungan dan semangat
Terima kasih atas cinta, kasih sayang, kesabaran,
keikhlasan, dan doa dalam menanti keberhasilanku.*

*Keluarga besarku, sahabat, teman – temanku yang selalu
memberikan dukungan, semangat dan doa kepadaku.*

Para pendidik dan Almamater Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalammualaikum Wr Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin tercurah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia- Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sang motivator bagi penulis untuk selalu ikhlas dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Teruntuk kedua orang tuaku bapak Alm Hi. Johansyah Tamin dan ibu Hj. Nurmah, terima kasih atas cinta dan sayang yang tak terhingga untuk kalian

yang telah membesarkan, mendidik dan selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya. Buat buya semoga selalu tenang di sisi Allah SWT dan semoga kita bisa dikumpulkan kembali di surga nya Allah SWT. Buat umi semoga umi sehat terus, panjang umur dan bisa selalu temenin dedek sampai dedek bisa bahagiain umi.

2. Teruntuk kakak-kakakku tercinta Joni Tamin S.E, Meri Dianty Tamin. S.Sos, M.Si, Fatoni Tamin S.Sos, Nasri Effendy Tamin, kakak-kakak iparku dan keponakanku. Terima kasih untuk segala dukungan, doa dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan lancar. Semoga kita menjadi saudara yang selalu akur dan kelak dapat membanggakan keluarga besar kita.
3. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku pembimbing utama. Terima kasih untuk pak nov yang sudah memberikan ilmu, saran, waktu, nasehat, dan bimbingannya dengan sabar sehingga apa yang diberikan dapat membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga Penulis menjadi giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Bambang Utoyo, M.Si selaku dosen pembahas dan penguji. Terima kasih atas saran, ilmu, dan motivasi yang bermanfaat bagi Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih untuk motivasi dan ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis sehingga memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik dalam mencapai kesuksesan.

7. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih untuk saran, nasihat, motivasi dan ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis sehingga memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik dalam mencapai kesuksesan.
8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA Bapak Prof. Dr Yulianto, M.S, Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP, Bapak Nana Mulyana, S. Ip, M.Si, Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si, Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.SI, Ibu Dewie Brima Atika, S.IP.,M.Si, Ibu Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP, Bapak Fery Triatmojo, S. A.N., M.AP, Ibu Susana Indriyati, S.IP., M.SI, Ibu Meliayana, S.IP., M.A, Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N. M.A Ibu Selvi Diana Meilinda dan Bapak Izul Fathu Reza. Terima kasih atas segala ilmu yang telah penulis peroleh di kampus semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.
9. Ibu Nur selaku Staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang ramah, dan selalu memberikan pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap informan penelitian Bapak Chepi Hendri Saputra S.T (Bappeda Kota Bandar Lampung), Bapak Joko Sulistio (Distako Kota Bandar Lampung), Bapak Emron Yasmi, S.H. M.H (BPPLH Kota Bandar Lampung), Ibu Veni Devialesti M.M (Disbertam Kota Bandar Lampung) dan masyarakat yang telah bersedia untuk di wawancarai terkait penelitian ini. Terima kasih atas waktu, bantuan dan informasi yang telah banyak diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Apa yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi penulis. Semoga semua kebaikan bapak dan ibu sekalian di balas oleh Allah SWT. .

11. Sabahatku wanita-wanita kuat dan kece Dafriesnatri (Dara virzinnia S.A.N, Frisca Dilijana Newyerani Nababan S.A.N , Putri Wulandari S.A.N dan Serli Ani.). terima kasih banyak untuk kebersamaan, dukungan, motivasi, nasihat, canda tawa, pengalaman, waktu, doa yang telah kalian berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pertemanan yang sudah seperti saudara ini tidak akan penulis lupakan sampai kapanpun. Kalian juga menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha, cepat menyelesaikan skripsi sehingga mencapai gelar S1. Semoga silaturahmi pertemanan dan persahabatan kita akan selalu terjalin sampai kita tua nanti aamiin. Selalu semangat dafriesnatri untuk mencapai kesuksesan di dunia dan diakhirat ke depan dan selalu berbahagia ☺
12. Buat Eko Satria Oktavian. Makasih udah nemenin hari-hari aku dari awal kuliah sampai aku bisa nyelesain skripsi ini. Makasih untuk support, nasihat, doa, cinta, sayang dan canda tawa (walaupun kita LDR ☹☹☹) yang selama ini udah dikasih ke aku, semoga kita selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka, selalu saling support supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi keinginan dari masing-masing kita dan keinginan bersama di masa depan. Makasih lho udah selalu jadi laki-laki yang sabar dan Semangat buat kamu untuk meraih gelar S.KOM nya dan cepet mendapatkan kerja yang diinginkan ☺☺☺
13. Terima kasih buat teman – teman seperjuangan ANE 2012 (AMPERA) aris, ageng, alga devicho, ahmad sulaiman, anis rahmawati, anis dubipata, ajeng, ageng, akbar hari wijaya, ayu septiani, alfajar, ali firdaus, berry, andre Pratama, guruh, ayu tsanita, ayu widya puspita, bayu kurniawan, chairani salamah, dewi, dian, dwini, dianisa, herlina, emi marta, endry ardiyanto,

ernawati, fadilla nuari, firdalia, fitri rustiana, ghea, ica yulita, imam khoirudiin, ikhsan, ikhwan, iyaji, siti muslimah, intan, johansyah, kiki, kirana, lena, lianse, antonia, si kembar icup dan ipul, alan, irlan, maya, rezki anantama, mutiara, melisa, eko, nadiril, novaria, novita sari, rifky andriansyah, rifky cibby, richa mollytha, sholeh ridlwan, omega, quqila, rhani umay, ria shellawati, ridha ayu amalia, suci, silvia yolanda, taufik, widji ramadhani, yeen gustiance, yoanita, dan yuyun. Terima kasih atas bantuan, kebersamaan, canda tawa, dukungan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Semoga pertemanan dan komunikasi kita selalu terjalin walaupun kita sudah lulus 😊 tetap semangat ampera sukses buat kita semua aamiin

14. Terima kasih untuk Anisa Rahmawati, Novaria, Dian, Ayu Septiani, Bj Sedy Pratama, Arinta Fitria Agnes, Fitri, Rahma Diani, Lela, Laras, Ayu Wulandari, Leo, Iqbal, Sidi, Uun, Uki, Ghina, Septia, Okke. Makasih udah selalu kasih semangat dan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita bisa menjaga tali silaturahmi yang udah terjalin selama ini dan sukses untuk kita semua dalam meraih gelar S.A.N
15. Abang dan mbak HIMAGARA: bang ciko, bang Aden, bang rendi, bang loy, bang Ali, bang satria, mbak nona, mbak karina, mbak corie, mbak meri, mbak nuzul, mbak sheila. Terima kasih bang, mbak buat nasihat dukungan, dan bantuannya selama ini.
16. Para pembahas mahasiswa/i dan moderatorku dari proposal dan hasil (Oliva valerin, Putri wulandari, Serli Ani, Rifky Andriansyah, Dara) . terima kasih banget telah udah meluangkan waktu nya, udah memberikan kritikkan dan sarannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

17. Terima kasih untuk sahabat-sahabat SMA aku buat Ria, Marlia, Winda, Amel, Evi, Anisa, Adies, Rizky, Wahyu, Septiyo, Bagus, Mandala, Fadila. Makasih untuk persahabatan yang udah kayak saudara yang udah kita bangun lebih dari 7 tahun ini, semoga kita bisa selalu menjadi 1 keluarga yang akan selalu memberikan canda tawa yang tiada hentinya dan jangan pernah bosan-bosennya dengan keanehan dan kegilaan yang setiap kali di lakuin di saat kita kumpul, pokoknya selalu jadi sahabat terbaiknya aku ya guys ☺☺ love you guys
18. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan KKN ines, hamid, intan, leon. Makasih untuk waktu 40 hari nya selama KKN. Semoga kita bisa kumpul bareng lagi dan bercanda bareng lagi walaupun sekarang udah pada sibuk masing-masing tapi selalu gw doain semoga kita semua sukses dan bisa meraih apa yang udah menjadi cita-cita kita semua. Pokoknya selalu jaga tali silaturahmi kita ya guys ☺☺ Terima Kasih juga untuk para aparat desa yang telah membantu kami selama berad a di lokasi KKN buat pak papsky, mamsky, babe, ibu, mb ana, mas andri, pak hiban, bu sulas, bu risma atas bantuannya dan nasihatnya selama 40 hari dalam melaksanakan kegiatan KKN sampai akhirnya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga untuk baru aku di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT supay kota bisa bertemu dilain kesempatan ☹☹
19. Keluarga besar Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama belajar di Universitas Lampung
20. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.

Tidak ada kata yang lebih indah selain kata “terima kasih dan maaf” atas semuanya. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Bandar Lampung, Maret 2017
Penulis

Purnama Sari T
NPM: 1216041079

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	13
1. Pengertian Kebijakan Publik	13
2. Tahapan Kebijakan Publik	15
B. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan	18
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan	18
2. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan	20
3. Masalah dalam Evaluasi Kebijakan	23
4. Tahap-tahap Evaluasi Kebijakan	26
5. Kriteria Evaluasi Kebijakan	28
6. Model Evaluasi	29
7. Kriteria Keberhasilan Kebijakan	29
8. Konsep Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung	30
C. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau	31
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)	31
2. Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau	32
3. Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau	34
4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau	35
D. Tinjauan Tentang Program Pengembangan Kota Hijau	36
1. Definisi Kota Hijau	36
2. Atribut Kota Hijau	36
3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan	37
4. Program Pengembangan Kota Hijau	38
E. Kerangka Pemikiran	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	42
B. Fokus Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
1. Jenis Data	44
2. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	49
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	49
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	50
3. Penarikan Kesimpulan	50
G. Teknik Keabsahan Data	51
1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data	51
2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data	52
3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan	53
4. Kepastian Data	53

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	54
1. Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung	54
2. Topografi.....	55
3. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung	56
4. Ketersedian RTH Kota Bandar Lampung	57
5. Rencana Pemenuhan	59
B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung	60
1. Profil Bappeda Kota Bandar Lampung.....	60
2. Tugas Pokok Dan Fungsi	62
3. Visi Dan Misi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Visi	63
C. Gambaran Umum Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bandar Lampung	67
1. Sejarah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.	67
2. Tugas Pokok dan Fungsi	69
3. Visi dan Misi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan.....	71
D. Gambaran Umum Dinas Tata Kota Bandar Lampung.....	72
1. Profil Dinas Tata Kota Bandar Lampung	72
2. Tugas Pokok dan Fungsi	73
3. Visi Dan Misi	74
E. Gambaran Umum Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH)	75
1. Profil Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH)	75
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	75
3. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	77
4. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup.....	79

5. Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan	82
6. Bidang Pertambangan dan Energi.....	84
7. Unit Pelaksanaan Teknis.....	86
8. Visi Dan Misi	87

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Di Kota Bandar Lampung	89
1. Efektifitas	90
2. Efisiensi	102
3. Kecukupan	106
4. Perataan.....	108
5. Responsivitas	110
6. Ketepatan	116
7. Upaya-Upaya yang Dilaksanakan Bappeda Untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung	118
B. Pembahasan Penelitian	124
1. Efektivitas	124
2. Efisiensi	126
3. Kecukupan	128
4. Perataan.....	129
5. Responsivitas	130
6. Ketepatan	130
7. Upaya-Upaya yang Dilaksanakan Bappeda Untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung	131

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	132
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung 2013-2015	6
1.2 Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung Yang Telah Beralih Fungsi	7
2.1 Tipe-Tipe Evaluasi	21
3.1 Informan Terkait Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2kh) Di Kota Bandar Lampung	46
3.2 Dokumen Terkait Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2kh) di Kota Bandar Lampung	47
3.3 Daftar Dokumen-Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian	48
4.1 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung.....	56
4.2 Jenis, Luas, Dan Sebaran RTH Publik Di Kota Bandar Lampung	58
4.3 Luas Rth Publik Dan RTH Privat Eksisting Di Kota Bandar Lampung ...	59
4.4 Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Pangkat/Golongan	69
4.5 Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Pendidikan.....	70
4.6 Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Tempat Kerja.....	70
4.7 Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Bidang Tugas	71
5.1 Lokasi Potensial Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung	91
5.2 Program Dan Kegiatan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Tahun 2014 – 2016	94
5.3 Program Dan Kegiatan Bpplh Tahun 2013-2016	101
5.4 40 Lokasi Hijau Dan Menarik Di Bandar Lampung.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Taman Dipangga	5
1.2 Tugu Bambu Runcing	5
2.1 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik	16
2.2 Kerangka Pikir	41
3.1 Analisis Data Model Interaktif	51
4.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.....	62
5.1 Kegiatan Penyiraman Tanaman di Median Jalan.....	96
5.2 Penanaman Tanaman di Median Jalan Gajah Mada	97
5.3 Kondisi Taman Kota Kalpataru, Kec. Kemiling.....	98
5.4 Penanaman Bibit Pohon di Hutan Kota	100
5.5 Contoh Vertical Garden	108
5.6 Media Jalan Kartini, Bandar Lampung	109
5.7 Surat Undangan Rapat Koordinasi.....	120
5.8 Absensi Rapat Koordinasi.....	121
5.9 Dokumentasi Kondisi Rapat	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang atau jalur dan mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri dari pertanaman kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota dan kawasan hijau perkarangan. Ruang terbuka hijau diklasifikasikan berdasarkan status kawasan bukan berdasarkan bentuk dan vegetasinya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. Ruang terbuka hijau diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Keberadaan ruang terbuka hijau memberikan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman,

nyaman, segar, indah dan bersih. Banyak fungsi ruang terbuka hijau baik dari segi ekologis, sosial budaya, maupun estetika yang memberikan kenyamanan dan memperindah lingkungan perkotaan. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung dan memiliki jangka waktu yang panjang. Ruang Terbuka Hijau selain sebagai kawasan lindung juga memiliki fungsi sosial sebagai *open public space* yang digunakan untuk tempat berinteraksi sosial antar masyarakat dalam menjalankan segala kegiatan. Ruang terbuka hijau ini juga harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termaksud akses bagi penyandang cacat.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Proporsi (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, dan dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal (Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan).

Namun fakta di lapangan dapat dilihat bahwa keberadaan ruang terbuka hijau masih jauh dari proporsi ideal, kekuatan pasar yang dominan merubah fungsi lahan sehingga keberadaan ruang terbuka hijau semakin terpinggirkan bahkan diabaikan fungsi dan manfaatnya. Keberadaan ruang terbuka hijau dikatakan masih

jauh dari proporsi ideal karena pemerintah lebih memfokuskan ke bidang pembangunan seperti pembangunan gedung, pengembangan dan penambahan jalur jalan yang mengakibatkan berkurangnya lahan atau sarana dan prasarana yang dipergunakan masyarakat untuk berinteraksi atau melakukan kegiatan sosial dalam masyarakat. Faktor itulah yang menyebabkan perubahan terhadap bentuk tata ruang wilayah perkotaan, secara fisik maupun non fisik. Jika perubahan tersebut tidak segera ditangani dengan baik, maka akan dapat dipastikan bahwa kerusakan terhadap tatanan ruang kota akan semakin terkikis dan punah dengan semakin meningkatnya perkembangan infrastruktur dan pengembangan kota.

Keberadaan ruang terbuka hijau yang masih jauh dari proporsi ideal ini menyebabkan pihak pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Bentuk campur tangan pemerintah tersebut bisa dilihat dari produk kebijakan yang mengatur tentang keberadaan ruang terbuka hijau. Walau bagaimanapun keberadaan ruang terbuka hijau di suatu daerah memang diperlukan sebagai sarana, Oleh karena itu, dalam penyediaan lahan diperkotaan perlu adanya peran serta baik dari pemerintahan, masyarakat maupun swasta. Dalam hal ini penyediaan ruang terbuka hijau harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang dan pemerintah harus mampu menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat sehingga dapat memberikan kenyamanan dan menciptakan lingkungan yang berkualitas. Ruang terbuka hijau pada dasarnya harus dapat diperhitungkan dalam proses perencanaannya karna ruang terbuka hijau sendiri memiliki tingkat ketersediaan baik secara kualitas maupun kuantitas agar dapat terciptanya kota berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dengan adanya peran dari ketiga aktor tersebut maka pengadaan lahan di perkotaan akan tertata sesuai dengan kawasan yang sesuai dan dapat menciptakan kenyamanan dan keindahan di perkotaan. Daerah harus memiliki lahan yang memadai yang dipergunakan untuk penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dengan standar minimal yang dimaksud tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan standar minimal ruang terbuka hijau yang harus dipenuhi oleh setiap kota di Indonesia. Standar minimal tersebut tercantum dalam Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (3), dalam Ayat (2) disebutkan bahwa proporsi paling sedikit ruang terbuka hijau di kota yaitu 30% (tiga puluh) persen, pada Ayat (3) dijelaskan mengenai besaran angka ruang terbuka hijau publik untuk wilayah kota yaitu sebesar 20% (dua puluh) persen, ruang terbuka hijau publik yang dimaksud adalah ruang terbuka hijau yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan, ruang terbuka hijau privat yang harus dimiliki suatu kota adalah 10% (sepuluh) persen, ruang terbuka hijau privat yang dimaksud adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman ruang atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.

Beberapa contoh ruang terbuka hijau yang terdapat di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1



Gambar 1.2

Gambar 1.1 merupakan Taman Dipangga yang lokasinya terletak di Teluk Betung Bandar Lampung dan Gambar 1.2 merupakan Tugu Bambu Runcing yang lokasinya terletak didekat sekolah Badan Pendidik Kristen (BPK) Penabur. Gambar di atas ,merupakan contoh ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bandar Lampung.

Keberadaan ruang terbuka hijau yang masih minim juga menjadi salah satu isu penting di wilayah Kota Bandar Lampung. Sebagai Ibukota Provinsi Lampung, dan juga sebagai pusat aktifitas masyarakat mendorong pembangunan yang kian pesat yang mempunyai efek terhadap pertumbuhan penduduk dan pengaruhnya terhadap kurangnya lahan adalah menjadi salah satu penyebab minimnya ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung. Keadaan ekologi lingkungan di Kota Bandar Lampung yang mulai mengalami penurunan kualitas mengakibatkan Kota Bandar Lampung mulai dilanda bencana seperti banjir dengan intensitas tinggi selama kurun waktu 1 tahun antara tahun 2013-2014. Hal itu terjadi diakibatkan oleh menurunnya kualitas lingkungan atau ekologi di Kota Bandar Lampung, salah satunya permasalahannya adalah penggunaan lahan yang kurang

memikirkan lingkungan (lampost.co/berita/intensitasbanjirdibandarlampungmeningkattajam diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 Pukul 20.00 WIB).

Ruang terbuka hijau menjadi salah satu unsur terpenting dalam penggunaan lahan yang bersifat lingkungan. Ruang terbuka hijau juga menjadi salah satu unsur terpenting dalam usaha melestarikan dan memulihkan keadaan lingkungan yang mulai menurun. Keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung yang masih minim di bawah standar nasional sebesar 30% tidak bisa menyeimbangkan keadaan lingkungan atau ekologi dengan kemajuan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dengan kepadatan penduduk yang ikut meningkat di Kota Bandar Lampung.

Jumlah ruang terbuka baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau di Kota Bandar Lampung masih belum memenuhi standar nasional yang telah ditentukan pemerintah. Terhitung pada tahun 2013 besaran angka persentase ruang terbuka khususnya ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung hanya sebesar 11,08%. Berikut tabel persebaran RTH di Kota Bandar Lampung:

Tabel 1.1. Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung 2013-2015

No.	Jenis RTH	Jumlah dalam Ha
1.	Taman Kota	19,25
2.	Taman Rekreasi	29,20
3.	Taman Wisata Alam	22,30
4.	Taman Lingkungan Perumahan	2,40
5.	Taman Lingkungan Perkantoran	8,90
6.	Taman Hutan Raya	510,00
7.	Hutan Kota	83,00
8.	Hutan Lindung	350,00
9.	Bentang Alam	745,80
10.	Pemakaman	40,33
11.	Lapangan Olah Raga	25,70
12.	Lapangan Upacara	1,60
13.	Lapangan Parkir	12,70

No.	Jenis RTH	Jumlah dalam Ha
14.	Lahan Pertanian	278,40
15.	Jalur Sutet	5,60
16.	Sempadan Sungai dan Pantai	0,90
17.	Media Jalan dan Pedestrian	43,01
18.	Jalur Hijau	6,50
Jumlah Total Luas RTH		2.185,59 Ha
Luas Kota Bandar Lampung		19.722,00 Ha
% Luas RTH		11,08

Sumber : Catatan Dinas Tata Kota, Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Dari data di atas terlihat bahwa Kota Bandar Lampung masih memiliki RTH yang sangat minim dari proporsi yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab proporsi ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung yang belum tercapai adalah banyak ruang terbuka hijau yang sudah beralih fungsi menjadi tempat *jogging*, tempat santai, dan menjadi tempat berjualannya para pedagang kaki lima. Adapula lokasi lahan kosong yang semestinya cocok dijadikan sebagai ruang terbuka hijau tetapi malah dijadikan untuk pembangunan ruko sebagai lahan untuk berbisnis. Berikut ini akan dijelaskan ruang terbuka hijau yang beralih fungsi di Kota Bandar Lampung :

Table 1.2. Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung yang Telah Beralih Fungsi

No	Lokasi Ruang Terbuka Hijau	Sudah beralih fungsi menjadi
1	Stadion Pahoman	Tempat <i>jogging</i> dan bersantai
2	PKOR Wayhalim	Hutan Kota Wayhalim, perkantoran dan ruko, dan menumpuknya pedagang kaki lima

(Sumber : www.kupastuntas.co/berita-lampung-miskin-rth-.html, di akses pada tanggal 27 Januari 2016 Pukul 16.00 WIB)

Pada Tabel 1.2 dijelaskan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau sudah banyak beralih fungsi menjadi tempat *jogging*, bersantai, dan dijadikan wilayah perkantoran. Keberadaan ruang terbuka hijau yang masih jauh dari proporsi ideal

tersebut menuntut pemerintah harus segera mengambil tindakan penyelesaian secepatnya. Untuk mencapai proporsi tersebut maka pada tahun 2011 Kementerian PU merintis sebuah program yaitu program pengembangan kota hijau (P2KH) yang dimana program ini merupakan wujud nyata atau kolaborasi antar pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan kota hijau.

Kota hijau merupakan konsep kota yang ramah lingkungan, pengurangan limbah dan memanfaatkan sumber daya alam yang secara efektif dan efisien. Adapun Tujuan dari program pengembangan kota hijau (P2KH) adalah untuk meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten. Selain itu dapat meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda hijau perkotaan. Salah satu daerah yang ikut melaksanakan program kota hijau adalah Kota Bandar Lampung.

Sesuai dengan visinya, Kota Bandar Lampung dalam jangka panjang tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan jasa yang semata-mata mengejar peningkatan kualitas kesejahteraan dan perekonomian kota. Hal tersebut diiringi dengan upaya pembangunan kota sesuai dengan tata ruang dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga program kota hijau tersebut ditujukan untuk mewujudkan pembangunan kota yang sinergis. Program ini di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) tahun 2013-2017 yang dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kota hijau ini adalah Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan pada pelaksanaannya yakni Dinas Tata Kota (Distako), Badan Pengelola dan

Perlindungan Lingkungan Hidup (BPPLH), dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam).

Program ini merupakan program kolaboratif antar pemerintah kabupaten dan kota yang dimana ini merupakan langkah nyata kegiatan yang inovatif untuk mewujudkan kota hijau. Salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan kota hijau tersebut dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau serta memberikan pengarahannya akan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat di suatu daerah. Tetapi pada kenyataannya, langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah kota ini belum dapat berjalan secara efektif karena pemerintah terlihat mengubah fokus pembangunan menjadi ke arah pembangunan gedung perkantoran dan kawasan perekonomian.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau yang dilakukan dalam program kota hijau serta kurangnya koordinasi antar instansi dalam pengembangan kota hijau guna mewujudkan kota yang ramah lingkungan dan untuk dapat merealisasikan atau mewujudkan keberadaan ruang terbuka hijau yang mumpuni di perkotaan, maka diperlukannya komitmen yang kuat dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat dan Pemangku kepentingan lainnya dengan mendorong pemukiman bangunan melalui bangunan vertikal supaya dapat meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau tanpa adanya pembatasan lahan.

Tetapi pada realitanya masih banyak ditemukan masalah dalam pelaksanaan program pengembangan kota hijau (P2KH) salah satunya kurang komunikasi dari Kementerian PU kepada SKPD terkait program dan masa berlakunya program.

Komunikasi yang kurang diberikan oleh Kementrian PU pada saat penetapan RAKH yang mengakibatkan program ini tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien karna SKPD yang terkait kurang paham dengan adanya program pengembangan kota hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung. Selain itu pula terjadi nya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar SKPD, SKPD yang bertanggung jawab dalam program ini yaitu BAPPEDA yang dibantu oleh Distako, BPPLH, dan Disbertam.

Tumpang tindih tupoksi ini terjadi pada saat akan dilaksanakan program pengembangan kota hijau (P2KH) ini yang dimana dalam pelaksanaan nya semua kegiatan dilakukan hanya oleh BAPPEDA dan SKPD yang lain hanya melakukan tugas koordinasi mengenai pelaksanaan program pengembangan kota hijau (P2KH) tersebut. Semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan tanggung jawab terhadap program tersebut berada ditangan BAPPEDA. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar SKPD karna hanya BAPPEDA yang paling berperan dalam pelaksanaan program pengembangan kota hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung.

Adanya tumpang tindih tupoksi antar dinas tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti terkait **“Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembanagn Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Bappeda untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran hasil Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bappeda untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Penelitian ini mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara terutama mengenai evaluasi suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam skripsi ini peneliti berfokus pada Evaluasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung

2. Aspek Praktis

Penelitian ini memberikan masukan kepada BAPPEDA Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan ruang terbuka hijau yang memadai di Kota Bandar Lampung agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Islamy dalam Sulistio (2012:3) menyatakan bahwa:

“Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik (instansi atau badan-badan pemerintah) bersama-sama dengan aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat. Ruang lingkup studi kebijakan publik adalah :

- a) Penyusunan agenda kebijakan
- b) Formulasi kebijakan
- c) Adopsi kebijakan
- d) Implementasi kebijakan
- e) Evaluasi kebijakan
- f) Anjuran kebijakan dan rekomendasi kebijakan

Dunn dalam Pasolong (2007:39) menyatakan bahwa :

“Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah”.

Eyestone dalam Winarno, (2012:19) menyatakan bahwa

“Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal”.

Ada beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya tentang kebijakan publik. Sehingga kebijakan publik memiliki ragam definisi. Friedrich dalam Winarno (2012:20) mendefinisikan kebijakan publik sebagai perangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya hambatan-hambatan sehingga mencapai sasaran dan tujuan yang telah diinginkan.

Pendapat lain juga dikatakan oleh ahli lainnya, Dye dalam Agustino (2008:7) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau yang tidak dikerjakan. Sedangkan Anderson dalam Winarno (2012:19) merumuskan kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi satu masalah.

Dari beberapa pendapat ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik (instansi atau badan-badan pemerintah) bersama-sama dengan aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Tahapan Kebijakan Publik

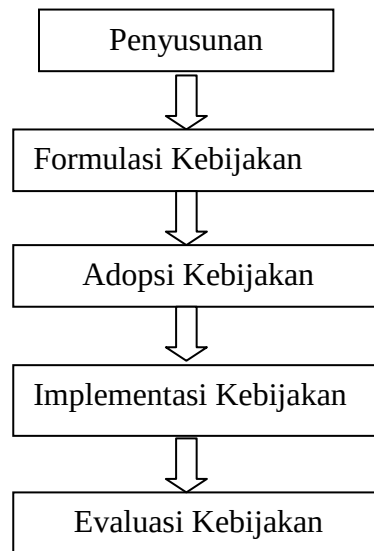
Meskipun ada fakta bahwa seringkali muncul kekecewaan terhadap kerangka analisis kebijakan yang dominan, yakni analisis pengambilan keputusan rasional, namun pendekatan tahapan (*stagist*) atau siklus tetap menjadi basis untuk analisis proses kebijakan dan analisis didalam untuk proses kebijakan yang akan datang. Laswell dalam Parsons (2005:8) berpendapat tahapan proses kebijakan terdiri dari: Inteligensi, Promosi, Preskripsi, Invokasi (*invocation*), Aplikasi, Penghentian (*termination*) dan Penilaian (*appraisal*).

Selain itu ada pula pendapat Anderson dalam Santosa (2008:36) mengemukakan bahwa terdapat lima tahapan-tahapan kebijakan, yaitu :

- a) Formasi masalah
- b) Formulasi
- c) Adopsi
- d) Implementasi
- e) Evaluasi

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan beberapa *variable* yang harus dikaji. Beberapa ahli mengkaji kebijakan publik dan membaginya dalam proses-proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengkaji kebijakan publik. Melihat pendapat beberapa ahli tentang tahapan-tahapan kebijakan dengan urutan yang berbeda.

Dunn dalam Winarno (2012:31) memiliki pendapat tentang tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut:



Gambar 2.1 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Sumber: Dunn dalam Winarno (2012:31)

a. Tahap Penyusunan Agenda

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:30) penyusunan agenda adalah Pejabat-pejabat yang duduk dalam pemerintahan akan menempatkan masalah-masalah yang akan dijadikan dalam agenda publik. Sebelum menetapkan masalah-masalah yang akan masuk dalam agenda publik, masalah-masalah yang ada di publik akan berkompetisi terlebih dahulu sehingga akhirnya nanti akan ada beberapa masalah yang masuk dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap agenda ini ada masalah yang tidak disentuh sama sekali, ada pula masalah yang dijadikan fokus dalam agenda serta terdapat pula masalah yang akan ditunda untuk waktu yang lama karena alasan-alasan tertentu.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:31) tahap formulasi kebijakan adalah Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan, masalah tersebut kemudian akan dicari bentuk-bentuk cara untuk penyelesaiannya. Pemecahan masalah tersebut berasal dari alternatif-alternatif (*policy alternative*) yang ada. Penyeleksian alternatif-alternatif tersebut sama halnya dengan menetapkan masalah yang ditetapkan sebagai agenda publik yaitu beberapa alternatif bersaing untuk bisa diambil dan ditetapkan sebagai penyelesaian dari permasalahan. Pada tahapan formulasi ini para aktor memainkan perannya untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:31) tahap adopsi kebijakan adalah Alternatif-alternatif yang ditawarkan para perumus kebijakan tentu banyak dan dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, hanya salah satu yang dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara pimpinan atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:31-32) tahap implementasi kebijakan adalah Suatu program kebijakan hanya akan menjadi dokumen serta arsip-arsip yang tertata rapi jika kebijakan tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah sampai pada tingkat

bawah sehingga diharapkan kebijakan yang sudah terbentuk tidak sia-sia dan berjalan dengan baik. Pada tahap implementasi berbagai kepentingan akan bersaing yang pada nantinya akan bermunculan para pelaksana yang mendukung kebijakan tersebut dan para pelaksana yang menolak dengan kebijakan tersebut.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:32) tahap evaluasi kebijakan adalah Tahap evaluasi ini kebijakan yang telah diimplementasikan akan dinilai tingkat keberhasilannya untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik terutama untuk mengatasi masalah publik. Ketika pada tahap ini akan ditetapkan ukuran atau indikator-indikator yang menjadi alat untuk mengukur suatu kebijakan apakah berhasil atau gagal.

Beberapa tahap-tahap kebijakan di atas bisa disimpulkan bahwa tahap-tahap kebijakan merupakan suatu proses terbentuknya suatu kebijakan dimana pada setiap tahapan satu dengan yang lainnya sangat berkaitan. Untuk penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada proses evaluasi kebijakan.

B. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Setiap kebijakan pemerintah selalu menghasilkan dampak yang diharapkan, yang menguntungkan maupun yang merugikan. Semua jenis dampak itu menjadi subyek dari studi evaluasi. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada

konstituenya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166) menyatakan bahwa :

“Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut”.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2008:166), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda:

“Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang.

Menurut Dunn dalam Nugroho (2011:670) mendefinisikan bahwa:

“Evaluasi kebijakan sebagai pemberi informasi mengenai nilai, manfaat dari suatu hasil kebijakan yang bisa dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi”.

Beberapa pendapat dari para ahli tersebut peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang fungsional karena evaluasi kebijakan dilakukan bukan hanya pada titik penetapan dan implementasi suatu kebijakan, akan tetapi evaluasi kebijakan harus dilakukan sepanjang proses kebijakan itu sendiri.

2. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut James Anderson dalam Winarno (2012 :243) terdapat tiga tipe evaluasi kebijakan dimana tipe-tipe tersebut masing-masing didasarkan pada pemahaman evaluator terhadap evaluasi. Tipe-tipe tersebut adalah :

- a. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.
- b. Tipe kedua, evaluasi memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu.
- c. Tipe ketiga, tipe evaluasi kebijakan yang sistematis.

Ketiga tipe tersebut merupakan tipe-tipe evaluasi. Kemudian pada setiap tipe tersebut masing-masing tipe memiliki konsekuensi serta fokus apa yang akan menjadi kajian dalam evaluasi suatu kebijakan.

Selain itu pendapat lainnya juga muncul dari para ahli lainnya, menurut Dunn dalam Nugroho (2011:287) tipe-tipe evaluasi terdiri:

- a. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produktif atau layanan atau nilai moneter.
- b. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dengan ongkos moneter.
- c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya

masalah. Kriteria kecukupan menekankan kuatnya hubungan antar alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan.

- d. Perataan, erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan merujuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat hubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber masyarakat.
- e. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
- f. Ketepatan, kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program atau kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tertentu.

Tabel 2.1. Tipe-tipe Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata pada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan berguna atau bernilai?

Sumber: Dunn dalam Nugroho(2011:671)

Dari pendapat para ahli peneliti lebih tertarik pada tipe evaluasi Dunn, yang menilai evaluasi dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Pada penelitian ini dari karakteristik evaluasi Dunn peneliti mengambil 6 (enam) karakteristik evaluasi yang dianggap cocok digunakan dalam penelitian program P2KH di Kota Bandar Lampung.

Peneliti menggunakan 6 kriteria tersebut karena pada efektivitas peneliti ingin meneliti keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, pada efisiensi peneliti ingin melihat usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, pada aspek kecukupan peneliti ingin melihat seberapa besar pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah, pada aspek perataan peneliti ingin melihat biaya yang digunakan dapat dikelola dengan baik dalam menjalankan program ini, lalu pada aspek responsivitas peneliti ingin melihat hasil dari kebijakan ini dapat memuaskan kebutuhan atau nilai disetiap kelompok dan yang terakhir aspek ketepatan peneliti ingin melihat hasil yang didapatkan ini dapat berguna atau bernilai baik disetiap kelompok atau masyarakat.

3. Masalah dalam Evaluasi Kebijakan

Untuk menilai suatu kebijakan berhasil ataupun gagal, maka diperlukan tahapan-tahapan untuk mengevaluasi suatu kebijakan. Evaluasi merupakan proses yang rumit dan kompleks, karena memang dalam evaluasi melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu. Namun dalam proses evaluasi suatu kebijakan tentunya ada beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh peneliti.

Hogwood dan Gunn dalam Winarno (2012:245) mengidentifikasi beberapa masalah berat yang menjadi kendala dalam evaluasi kebijakan publik atau program. Masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

a. Tujuan-tujuan kebijakan

Jika tujuan kebijakan tidak jelas atau dengan kata lain tujuan tersebut tidak dapat diukur dengan tidak adanya kriteria yang jelas untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan maka tujuan akan terlihat samar-samar. Kekaburan dalam tujuan kadangkala merupakan konsekuensi dari perbedaan-perbedaan titik pandangan mengenai tujuan-tujuan kebijakan.

b. Membatasi kriteria untuk keberhasilan

Bahkan pada saat tujuan kebijakan secara jelas menyatakan ada masalah tentang bagaimana keberhasilan tujuan itu akan diukur. Maka tujuan tersebut akan berubah dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Efek samping

Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan ataupun program seringkali mempengaruhi evaluasi kebijakan tersebut. Kesulitan yang biasanya muncul pada saat orang mencoba untuk mengidenifikasi dan mengukur efek-efek/pengaruh sampingan dan memisahkan efek tersebut dari kebijakan atau

program yang sedang dievaluasi. Terdapat masalah-masalah tentang faktor-faktor yang merugikan maupun faktor-faktor yang menguntungkan serta seberapa besar faktor ini dipertimbangkan secara relatif dengan tujuan-tujuan pokok kebijakan.

d. Masalah data

Informasi yang diperlukan untuk menilai dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan atau program tidak tersedia atau mungkin saja tersedia namun dalam bentuk yang tidak cocok.

e. Masalah metodologi

Masalah yang seperti ini umum untuk masalah tunggal, atau suatu kelompok penduduk, menjadi target dari beberapa program dengan tujuan yang sama atau saling berkaitan.

f. Masalah politik

Evaluasi bisa menimbulkan ancaman bagi beberapa orang. Keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan atau program di mana politisi atau para birokrat memiliki komitmen terhadap karier secara pribadi, dan dari mana kelompok-kelompok klien menerima keuntungan yang sedang dievaluasi. Pertimbangan-pertimbangan ini jelas akan memengaruhi bagaimana hasil evaluasi bisa dijalankan, sebagai bentuk kerjasama para pejabat publik dan klien.

g. Biaya

Ini bukan tidak umum untuk evaluasi suatu program terhadap biaya sebesar satu persen dari total biaya program biaya seperti ini merupakan pengalihan dari pemberian kebijakan atau program.

Anderson dalam Winarno (2012:248) menyatakan setidaknya ada delapan faktor yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tidak memperoleh dampak yang diinginkan, yakni:

- a. Sumber-sumber yang tidak memadai.
- b. Cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.
- c. Masalah publik seringkali disebabkan karena banyak faktor sementara kebijakan yang ada ditujukan hanya kepada penanggulangan atau beberapa masalah saja.
- d. Cara orang menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan-kebijakan publik yang justru meniadakan dampak kebijakan yang diinginkan.
- e. Tujuan kebijakan tidak sebanding dan bertentangan satu sama lain.
- f. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah tersebut.
- g. Banyaknya masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan.
- h. Menyangkut sifat masalah yang akan dipecahkan oleh suatu tindakan kebijakan.

4. Tahap-tahap Evaluasi Kebijakan

Setelah mengetahui masalah-masalah yang akan dihadapi di harapkan peneliti dapat melakukan tahapan-tahapan evaluasi. Menurut Dunn dalam Santosa, (2008: 44) ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi kebijakan antara lain :

- a. Spesifikasi program kebijakan
- b. Apakah kegiatan-kegiatan dan sasaran yang melandasi program
- c. Koleksi informasi program kebijakan
- d. Modeling program kebijakan
- e. Penaksiran evaluabilitas program kebijakan
- f. Umpan balik penaksiran evaluabilitas untuk pemakai

Selain itu pendapat lain tentang langkah-langkah evaluasi kebijakan juga dilontarkan oleh beberapa ahli salah satunya Edward A. Suchman. Suchman dalam Winarno (2012:233) mengemukakan ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Tahap-tahap evaluasi kebijakan Suchman dalam Winarno (2012:233) juga mengidentifikasi beberapa pertanyaan dalam menjalankan evaluasi yakni:

- a. Apakah yang menjadi isi tujuan program?
- b. Siapa yang menjadi target program?
- c. Kapan perubahan yang diharapkan terjadi?
- d. Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak?
- e. Apakah dampak yang diharapkan besar?
- f. Bagaimanalah tujuan tersebut dicapai?

Melihat beberapa tahapan yang ada, yang paling terpenting dalam evaluasi kebijakan adalah mendefinisikan masalah. Sebab dengan mengidentifikasikan masalah-masalah maka tujuan-tujuan dalam evaluasi dapat disusun dengan jelas dan jika mengidentifikasikan masalah gagal maka tujuan yang akan terjadi adalah kegagalan dalam memutuskan tujuan-tujuan. Segala bentuk proses evaluasi kebijakan peneliti harus memiliki penilaian standar untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu efektifitas sebuah kebijakan pemerintah. Pada intinya yang dinilai dari sebuah proses evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan adalah isi kebijakan, implementasi maupun dampaknya.

Pada program P2KH tahapan-tahapan yang digunakan yaitu:

- a. Mengidentifikasi program P2KH
- b. Mendeskripsikan SOP program P2KH
- c. Menganalisis masalah dan kendala yang terjadi pada pelaksanaan program P2KH

- d. Mengukur pencapaian hasil dengan target yang telah ditetapkan program P2KH

5. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut Suharto (2008:40) evaluasi kebijakan pada dasarnya:

“Merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang diterapkan. Evaluasi kebijakan menyediakan data dan informasi yang bias dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan menunjukkan rekomendasi-rekomendasi bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang diterapkan.

Kriteria evaluasi biasanya dirumuskan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Indikator masukan (*input indicators*): bahan-bahan dan sumberdaya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan;
- b. indikator proses (*procces indicators*): cara-cara dengan mana bahan-bahan dan sumberdaya diolah atau ditransformasikan menjadi penyedia pelayanan;
- c. indikator keluaran (*output indicators*): barang-barang atau pelayanan-pelayanan yang diproduksi oleh suatu program.
- d. indikator dampak (*outcome indicators*): hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu program.

6. Model Evaluasi

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Untuk itu evaluasi memiliki beberapa model yang dapat digunakan.

Menurut Lester dan Steward dalam Nugroho (2011:676), mengelompokkan evaluasi menjadi 4 bagian yakni :

- 1) Evaluasi proses, evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi,
- 2) Evaluasi dampak, evaluasi berkenaan dengan hasil atau pengaruh implementasi kebijakan,
- 3) Evaluasi kebijakan, evaluasi yang menguji apakah terdapat kesesuaian antara hasil dan tujuan,
- 4) Evaluasi meta-evaluasi, evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

7. Kriteria Keberhasilan Kebijakan

Kriteria keberhasilan kebijakan atau program dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain:

- a. Cara pelaksanaan,
- b. Agen pelaksana,
- c. Kelompok sasaran,
- d. Manfaat program.

Sedangkan pada perspektif hasil, program atau kebijakan dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja dikatakan berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan dan suatu program dapat dikatakan gagal dari sudut proses, namun berhasil jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan.

(Sumber: <http://rudisalam.files.wordpress.com/2010/01/artikulasi-konsep-implementasi-kebijakan-jurnal-baca-agustus-2008>, di akses pada 28 januari 2016 Pukul 20.00 WIB).

Adanya teori kriteria keberhasilan kebijakan sangat membantu peneliti dalam menetapkan kriteria keberhasilan program P2KH. Dengan adanya kriteria keberhasilan program, maka peneliti mengetahui hal-hal penting apa saja yang akan menjadi fokus penelitian. Kriteria keberhasilan program P2KH, antara lain:

- a. Cara pelaksanaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
- b. Para stakeholder dan sumberdaya lainnya sesuai dengan SOP
- c. Target sasaran sesuai dengan SOP
- d. Adanya manfaat program bagi pelaksana program
- e. Tercapainya hasil serta dampak yang diinginkan setelah pelaksanaan program

8. Konsep Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung

Dunn dalam Nugroho (2011:670) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai :

“Pemberi informasi mengenai nilai, manfaat dari suatu hasil kebijakan yang bisa dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Konsep evaluasi proses itu sendiri meliputi : 1. Evaluasi input : bahan-bahan dan sumberdaya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan; 2. Evaluasi proses : cara-cara dengan mana bahan-bahan dan sumberdaya diolah atau ditransformasikan menjadi penyedia pelayanan; 3. Evaluasi output : barang-barang atau pelayanan-pelayanan yang diproduksi oleh suatu program. 4. Evaluasi dampak : hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu program.

Evaluasi kebijakan P2KH ini akan difokuskan pada evaluasi proses atau evaluasi pelaksanaan P2KH. Evaluasi proses terhadap kebijakan P2KH ini akan ditekankan pada sejauh mana kebijakan atau program tersebut menjangkau tujuan yang telah ditentukan. Dalam mengevaluasi proses atau implementasi kebijakan P2KH maka dapat digunakan tipe evaluasi menurut Dunn dalam Nugroho (2011 : 729) terdiri dari : 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Kecukupan, 4. Perataan, 5. Responsivitas, dan 6. Ketepatan.

C. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pada penataan ruang mendefinisikan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah. Ruang terbuka sebagai salah satu unsur kota yang sangat penting di lihat dari fungsi ekologis. Undang-Undang Perencanaan Ruang (UUPR) pasal 1 butir 31, menyatakan ruang terbuka hijau adalah memanjang atau jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 adalah RTH merupakan area memanjang, jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Menurut Purnomohadi dalam Wibowo (2009:33), RTH adalah suatu lapangan yang ditumbuhi berbagai

tumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau adalah ruang yang berfungsi sebagai wadah untuk makhluk hidup ataupun manusia dalam melakukan kegiatan serta sebagai tempat yang nyaman untuk makhluk hidup berkembang biak agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.

2. Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau

Menurut Hasni (2010:230) menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan pengisian hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budi daya, seperti tanaman komoditas usaha pertanian yang dalam hal ini penekanan pada nilai produktivitasnya, termasuk perkebunan, perhutanan / hutan kota, maupun peternakan dan usaha perikanan, hijau pertamanan dan olahraga biasanya lebih ditekankan pada nilai kreatifnya baik pasif maupun aktif, serta keindahannya dan seterusnya”.

Ditinjau dari kondisi ekosistem pada umumnya, apapun sebutan bagian-bagian Ruang Terbuka Hijau kota tersebut, hendaknya semua selalu mengandung tiga fungsi pokok Ruang Terbuka Hijau yaitu :

- a. Fisik Ekologis (termasuk kekayaan jenis dan plasma nutfahnya)
- b. Ekonomis (nilai produktifnya / finansial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan)
- c. Sosial budaya (termasuk pendidikan, nilai budaya dan psikologisnya)

Fungsi RTH dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008, yaitu :

a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis :

- 1) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara atau paru-paru kota
- 2) Pengaturan iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
- 3) Sebagai peneduh
- 4) Produsen oksigen
- 5) Penyerap air
- 6) Penyedia habitat satwa
- 7) Penyerap polutan media udara, air dan tanah serta penahan air

b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu :

- 1) Fungsi sosial dan budaya :
 - a) Menggambarkan ekspresi budaya lokal
 - b) Merupakan media komunikasi warga kota
 - c) Tempat rekreasi
 - d) Wadah dan objek pendidik, peneliti, dan pelatihan dalam mempelajari alam
- 2) Fungsi estetika
 - a) Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro : halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun mikro : lansekap kota secara keseluruhan
 - b) Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota
 - c) Pembentuk faktor keindahan arsitektural

- d) Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 pasal 3 fungsi RTH adalah :

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
- b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara
- c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati
- d. Pengendali tata air dan
- e. Sarana estetika kota

Disamping fungsi-fungsi umum tersebut, RTH, khususnya dari berbagai jenis tanaman pengisi, secara rinci mempunyai multi fungsi anatara lain sebagai penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri atau disebut sebagai fungsi ekologis melalui pemilih jenis dan sistem pengelolaannya (rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan / pengaturan) yang tepat dan baik. Maka tanaman atau kumpulannya secara rinci dapat berfungsi pula sebagai pengatur iklim mikro, penyerap dan penyerap polusi media udara, air dan tanah, jalur pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, pandangan, dan lain-lain.

3. Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yaitu :

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antar lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Pada dasarnya ruang terbuka hijau sangatlah penting diadakan di kawasan perkotaan. Karena seperti yang kita lihat dikawasan perkotaan sangat sedikit untuk dibentuknya ruang terbuka hijau. Banyak manfaat yang terjadi jika terbentuknya ruang terbuka hijau atau kota hijau itu sendiri dikawasan perkotaan. Hal itu terlihat Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan adalah :

- a) Manfaat langsung dalam pengertian cepat yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah)
- b) Manfaat tidak langsung berjangka panjang yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala aspek baik itu flora maupun fauna yang ada (keanekaragaman hayati).

D. Tinjauan Tentang Program Pengembangan Kota Hijau

1. Definisi Kota Hijau

Menurut buku panduan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pengertian kota hijau adalah kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kota yang mengutamakan keseimbangan ekosistem hayati dengan lingkungan terbangun sehingga terciptanya kenyamanan bagi penduduk kota yang tinggal di dalamnya maupun bagi para pengunjung kota.

2. Atribut Kota Hijau

Untuk suatu pencapaian Kota Hijau yang baik, serta bermanfaat bagi masyarakat terdapat atribut Kota Hijau yang harus diketahui.

- a. Lima atribut kota hijau menurut (*Platt*)
 - 1) Kepekaan dan kepedulian masyarakat
 - 2) Beradaptasi terhadap karakteristik bio-geofisik kawasan
 - 3) Lingkungan yang sehat, bebas dari pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan
 - 4) Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan ruang
 - 5) Memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Maksud program pengembangan kota hijau (P2KH) adalah menjabarkan amanat UUPR (Undang-undang Perencanaan Ruang) tentang perwujudan 30% dari luas wilayah kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu menindak lanjuti 10 prakarsa bali dari forum *Sustainable Urban Development (SUD)* khususnya butir 7 yaitu “Mendorong peran pemangku kepentingan perkotaan dalam mewujudkan kota hijau”. Berupa inisiatif bersama antara pemerintan kabuoaten / kota masyarakat dan dunia usaha secara nasional. Tujuan dari program pengembangan kota hijau adalah meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi RTRW kota/kabupaten. Selain itu dapat meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda hijau perkotaan. Adapun sasaran program pengembangan kota hijau adalah terinisiasinya aksi-aksi konkrit sebagai perwujudan kota hijau dalam rangka implementasi RTRW kota/kabupaten secara nasional meliputi :

- a) Penyusunan *Green Maap*
- b) Penyusunan *Master Plan* RTH
- c) Pelaksanaan kampanye publik/sosialisasi
- d) Pelasanaan *Capacity Bilding* (pelatihan, workshop, dll)
- e) Pelaksanaan *Pilot Project* Percontohan RTH

Sasaran khusus program pengembangan kota hijau tahun 2011 yaitu merupakan penyusunan rencana aksi kota hijau (RAKH) / *local Action Plan* dan piagam komitmen kota hijau.

4. Program Pengembangan Kota Hijau

Bentuk program pengembangan kota hijau (P2KH) merupakan sinergi dan kolaborasi dari pemerintah. Pencapaian yang baik dalam program pengembangan kota hijau itu sendiri meliputi beberapa strategi yaitu :

- a. *Green Planing* dan *Desain* meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rancangan kota yang lebih sensitif terhadap agenda hijau
- b. *Green Open Space* meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan karakteristik kota / kabupaten melalui berbagai macam strategi
- c. *Green Community* meningkatkan partisipasi aktif masyarakat atau komunitas dan institusi swasta dalam perwujudan pengembangan kota hijau

Partisipasi pemerintah kabupaten atau kota meliputi pemerintah kabupaten atau kota yang memenuhi kriteria di atas diikutsertakan dalam P2KH dan pemerintah kabupaten atau kota yang berminat untuk berpartisipasi serta memberikan konfirmasi tertulis kepada sekretaris P2KH. Pemerintah kabupaten / kota peserta P2KH diundang dalam kegiatan sosialisasi, workshop dan pertemuan dalam rangka perumusan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH). Adapun pelaksanaan P2KH adalah kegiatan utama P2KH meliputi :

- a. Piagam Komitmen Kota Hijau merupakan piagam deklarasi komitmen dari pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan kota hijau
- b. Penyusunan proposal RAKH meliputi proposal RAKH yang disusun oleh kabupaten/ kota.

(Sumber:http://www.penataanruang.net/taru/upload/nspk/buku/BUKU_PANDUAN_P2KH.pdf diakses pada tanggal 22 Agustus 2015 Pukul 15.00 WIB)

E. Kerangka Pemikiran

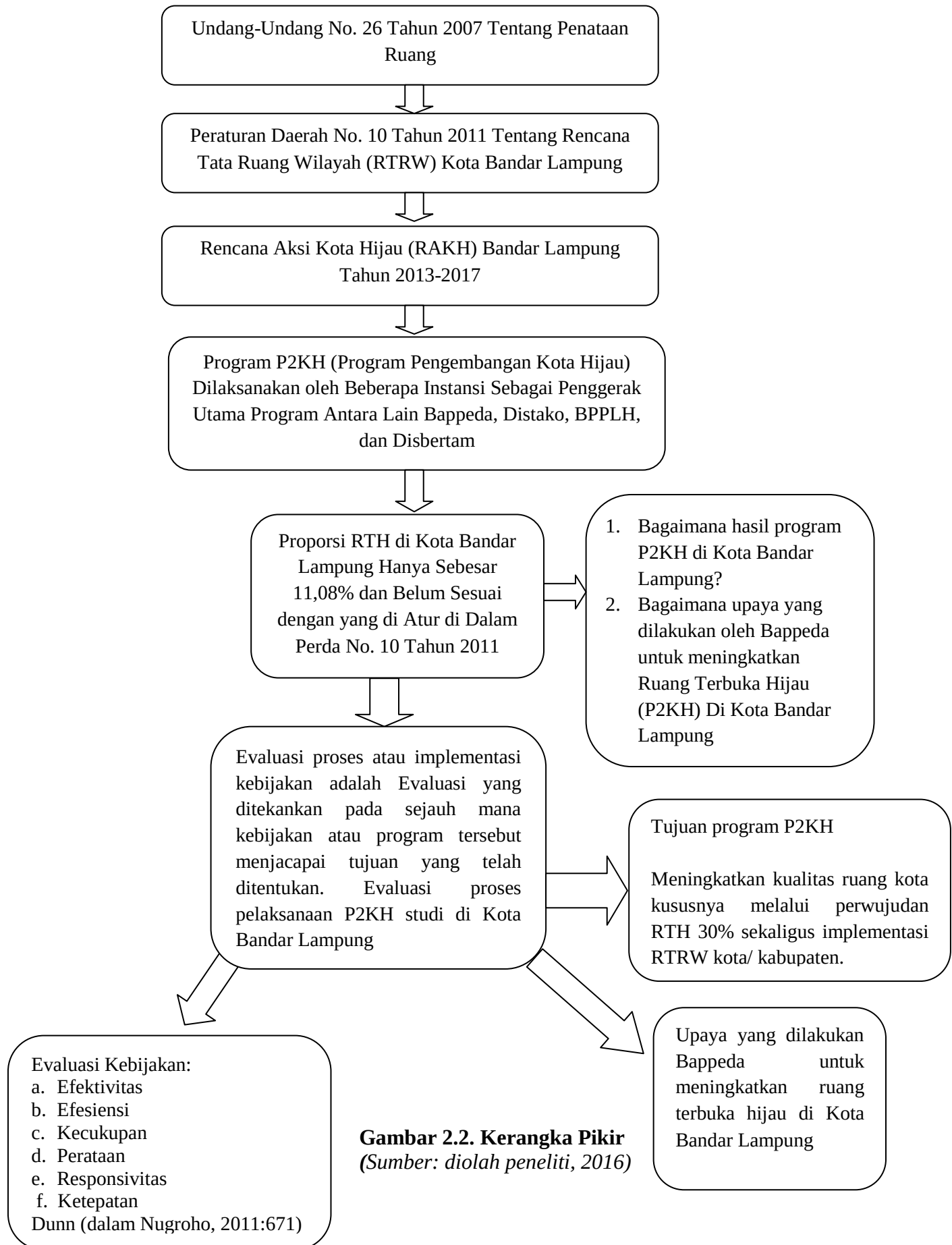
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana dalam pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota dan ruang terbuka hijau privat 10% dari luas wilayah kota . Berdasarkan hal tersebut Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandar Lampung yang di mana Perda ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang di dalam perda tersebut menjelaskan pula terkait proporsi 30% dari luas wilayah kota. Proporsi 30% tersebut terbagi atas ruang terbuka hijau public sebesar 20% dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10%.

Tetapi, pada realitanya Kota Bandar Lampung belum memenuhi proporsi yang telah ditetapkan dalam perda tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Tata Kota Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung baru mencapai 11,08% dan realita yang terjadi di Kota Bandar Lampung ruang terbuka hijau tidak di manfaatkan secara efektif atau di alih fungsikan contoh nya di PKOR Wayhalim Kota Bandar Lampung yang dimana itu merupakan tempat bermain anak-anak tetapi sekarang banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar area tersebut. Maka dari itu Pemerintah Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Bandar Lampung tahun 2013-2017 yang di dalam nya memuat program mengenai Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). RAKH ini merupakan aksi nyata pemerintah

Kota Bandar Lampung untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang baik secara kualitas maupun kuantitas serta memberikan kenyamanan bagi publik dalam berinteraksi dan beraktifitas di Kota Bandar Lampung.

Program ini dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengatasi ketidak tercapaian ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung. Dalam program P2KH terdapat beberapa instansi yang ditugaskan untuk menjalankan program tersebut. Instansi tersebut adalah Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung, Dinas Tata Kota (Distako) Kota Bandar Lampung, Badan pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung, dan Dinas Kebersihan dan Pertanaman (Disbertam) Kota Bandar Lampung. Dari beberapa instansi tersebut Bappeda adalah instansi yang menjadi sector utama dalam menjalankan program P2KH di Kota Bandar Lampung.

Pada penelitian ini peneliti akan menekankan pada evaluasi kebijakan P2KH ini akan difokuskan pada evaluasi proses atau evaluasi pelaksanaan P2KH dengan studi kasus di Kota Bandar Lampung yang akan melihat program ini sudah sesuai dengan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH). Evaluasi proses terhadap kebijakan P2KH ini akan ditekankan pada sejauh mana kebijakan atau program tersebut menjacapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam mengevaluasi proses atau implementasi kebijakan P2KH maka dapat digunakan tipe evaluasi menurut Dunn dalam Nugroho (2011:729) terdiri dari : 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Kecukupan, 4. Perataan, 5. Responsivitas, dan 6. Ketepatan. Selain itu juga penelitian ini akan melihat upaya apa saja yang dilakukan oleh Bappeda untuk meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.



Gambar 2.2. Kerangka Pikir
(Sumber: diolah peneliti, 2016)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif. Moleong (2011:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Menurut Bungin (2005:36), penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat

ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi atau pun variabel tersebut. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwasanya penelitian ini menggunakan penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hasil penyelenggaraan program P2KH serta menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program P2KH di Kota Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Untuk menciptakan penelitian yang terkonsentrasi, maka peneliti menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi evaluasi program pengembangan kota hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung terkait dari segi evaluasi kebijakan. Sementara untuk melakukan evaluasi kebijakan tersebut maka peneliti memilih efektivitas dan efisiensi sebagai alat ukur evaluasi pelaksanaan kebijakan program P2KH di Kota Bandar Lampung. Adapun indikator efektivitas dan efisiensi sudah terdapat dalam kriteria keberhasilan program P2KH. Fokus dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi program P2KH, yaitu :

1. Mengevaluasi program P2KH dengan menggunakan tipe evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn yang terdiri dari :
 - a. Efektivitas
 - b. Efisiensi
 - c. Kecukupan
 - d. Perataan
 - e. Responsivitas
 - f. Ketetapan

2. Upaya yang dilakukan oleh Bappeda dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *purposive* atau dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:218) *purposive* merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini bertempat di Bappeda Kota Bandar Lampung, Distako Kota Bandar Lampung, BPPLH Kota Bandar Lampung dan Disbertam Kota Bandar Lampung, karna dari keempat lokasi tersebut yang menjadi lokasi utama bagi peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program P2KH di Kota Bandar Lampung. Instansi yang menjadi sektor utama dalam pelaksanaan program P2KH ini ialah Bappeda yang dibantu atau berkoordinasi dengan Distako, BPPLH dan Disbertam dalam menjalankan program P2KH di Kota Bandar Lampung.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Berkaitan dengan hal ini, pada bagian ini jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis dan foto. Data adalah bahan keterangan dalam suatu

objek penelitian yang diperoleh. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian yang terjadi pada hasil pengumpulan peneliti selama berada di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan peneliti melakukan wawancara dengan informan yang ditentukan secara sengaja artinya informan yang terpilih yang mengetahui secara baik tentang evaluasi pelaksanaan program pengembangan kota hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung

- 1) Kepala Bidang Fisik Bappeda
- 2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dan Monitoring Dinas Tata Kota
- 3) Kepala sub bidang SDA BPPLH
- 4) Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis, foto, dll yang terkait dengan evaluasi program pengembangan kota hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung

2. Sumber Data

Menurut lofland dalam Basrowi dan Suwandi (2008:169), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut dapat

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data dari mana peneliti akan mendapatkan informasi berupa data-data yang diperlukan adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Informan

yaitu sumber data primer yang didapat dari orang-orang atau pihak yang mengetahui secara baik dan memiliki informasi tentang evaluasi pelaksanaan program pengembangan kota hijau di Kota Bandar Lampung, informan yang dimaksud yaitu :

Tabel 3.1 Informan Terkait Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung

NO	Jabatan / Instansi	Nama Informan	Tanggal Wawancara
1	Kepala Bidang Fisik Bappeda	Chepi Hendri Saputra S.T	10 November 2016
2	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dan Monitoring Dinas Tata Kota	Joko Sulistio	10 November 2016
3	Kepala Sub bidang SDA BPPLH	Emron Yasmi, S.H. M.H	26 November 2016
4	Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Veni Devialesti M.M	18 Desember 2016
5	Masyarakat Kota Bandar Lampung	Sahrul	17 November 2016
6	Pedagang Kaki Lima di Taman Kota Kalpataru	Adit	27 November 2016
7	Masyarakat pengunjung Taman Kota Kalpataru	Destia	27 November 2016
8	Masyarakat Kota Bandar Lampung	Beni	02 Februari 2017

Sumber : Diolah oleh peneliti 2016

b. Dokumen-dokumen

Merupakan sumber data sekunder yang didapati dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program pengembangan kota hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung.

Tabel 3.2 Dokumen Terkait Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung

NO	Dokumentasi	Sumber
1	Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Bandar Lampung Tahun 2013-2017	BAPPEDA
2	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	Website di internet
3	Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bandar Lampung	Website di internet
4	Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan	Website di internet
5	Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung 2005-2025	Website di internet

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2016

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis wawancara, dokumentasi, serta observasi. Atas dasar dari konsep tersebut, maka dari ketiga teknik data di atas akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Wawancara, yaitu berkomunikasi langsung dengan melakukan tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan keterangan dalam penelitian, berdasarkan indikator penelitian yang telah ditentukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini berupa pengumpulan data melalui surat kabar, website, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini di maksudkan untuk memperoleh data sekunder yang akan mendukung informasi. Beberapa dokumen dalam penelitian ini :

Tabel 3.3 Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian

NO	Dokumentasi	Substansi
1.	Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Bandar Lampung Tahun 2013-2017	Program mengenai kota hijau
2.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang	Pedoman untuk penyelenggaraan penataan ruang
3.	Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bandar Lampung	Pedoman secara rinci tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
4.	Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan	Pedoman tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
5.	Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025	Memberikan gambaran mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Bandar Lampung

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2016

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain

penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen berupa:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan pengertian yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugusan-gugusan dan menulis memo.

Pada tahapan ini, penulis memilah-milah mana data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian evaluasi pelaksanaan program pengembangan kota hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung dan mana yang bukan. Kemudian penulis memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian evaluasi pelaksanaan program pengembangan kota hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung

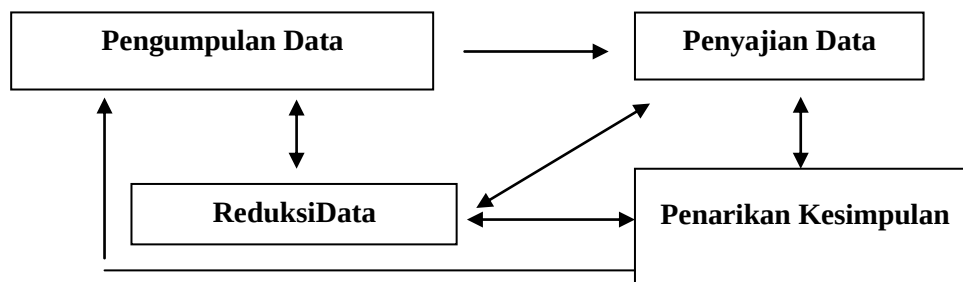
2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data akan mempermudah apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya yang didasarkan dengan apa yang telah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Dengan begitu maka data lebih terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan cara memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami terkait penelitian evaluasi pelaksanaan program pengembangan kota hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan penulis akan terasa sempurna karena data yang dihasilkan benar-benar maksimal. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan mengenai disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung.

Berikut ini adalah gambar dari analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman. Gambar tersebut akan memberikan gambaran bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses tersebut akan berlangsung secara terus menerus sampai data yang ditemukan sudah jenuh.



Gambar 3.1. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:247)

Dengan melalui langkah langkah-langkah tersebut di atas diharapkan penelitian ini dapat memberi hasil akhir yang maksimal terhadap penelitian yang nantinya akan disajikan.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2007:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh penulis pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain Moleong (2007:330). Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin dalam Moleong (2007:330) triangulasi terdiri dari Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data dengan metode yang sama.

b. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini penulis lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis data.

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Penulis mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil

observasi maupun dokumentasi secara transparan dan menguraikannya secara rinci.

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi penulis tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penulis seperti ini perlu diuji *dependability*nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka penulis selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. Kepastian Data

Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses. penelitian serta hasil penelitiannya.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Ibu Kota Propinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas 197,22 km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Topografi

Topografi Kota Bandar Lampung sangatlah beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 m. Daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan Pulau dibagian Selatan
- b. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame dibagian Utara
- c. Wilayah perbukitan terdapat disekitar Teluk Betung bagian utara, barat dan timur
- d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang bagian barat yaitu wilayah Gunung Betung dan Gunung dibalau serta perbukitan Batu Serampok dibagian timur

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian maksimum 700 mdpl, ketinggian 2

kecamatan tersebut lebih tinggi dibanding Kecamatan lainnya, sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing 2-5 mdpl. Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0-20 % dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0-40%, wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0% diantaranya berada di wilayah Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton. Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40% diantaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur.

3. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 902.885 jiwa (berdasarkan data tahun 2012), kepadatan penduduk sekitar 4.578 jiwa/km² dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Berikut adalah tabel jumlah penduduk dari tahun ke tahun :

Tabel 4.1
Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung

Tahun	2000	2010	2011	2013	2014	2030
Jumlah penduduk	743.109	881.801	922.808	1.167.101	1.251.642	2.400.00 (perkiraan)

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung di akses pada 20 Oktober 2016 Pukul 20.00 WIB

4. Ketersediaan RTH Kota Bandar Lampung

Berdasarkan konsep RTH dan berdasarkan hasil survei identifikasi di lapangan dapat diidentifikasi beberapa jenis RTH di Kota Bandar Lampung. Secara keseluruhan RTH yang dapat teridentifikasi berjumlah kurang lebih 2.775,39 hektar atau sekitar 14% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari RTH publik seluas kurang lebih 2.489,80 hektar dan 289,70 hektar RTH privat. RTH publik di Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil identifikasi dan analisa peta terdiri dari lapangan olah raga, pemakaman, taman kota, bukit/ gunung, rth sempadan, dan kawasan hutan/ suaka alam. Sedangkan RTH privat diantaranya terdiri dari taman perumahan, taman perkotaan, taman wisata, lapangan golf. Jika dilihat berdasarkan jenis tutupan lahan eksisting, Kota Bandar Lampung masih memiliki kawasan hijau yang relatif luas (lahan non terbangun) yaitu sekitar 51% dari luas kota, namun demikian kawasan non terbangun tersebut tidak dapat dimasukkan dalam luasan eksisting RTH kota karena belum dapat diidentifikasi kepemilikannya (privat atau publik).

Jenis RTH publik yang banyak terdapat di Kota Bandar Lampung saat ini adalah berupa kawasan bukit atau gunung dengan luas sekitar 1.66 .16 hektar atau sekitar 67% dari total luas RTH publik secara keseluruhan. Selain kawasan bukit dan gunung, kawasan hutan dan sempadan juga memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap luas RTH publik kota. Hasil identifikasi tersebut juga menunjukkan bahwa luas taman-taman kota di Kota Bandar Lampung masih sangat sedikit. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penduduk kota masih sulit untuk menemukan taman-taman kota yang representatif, bukan hanya memiliki fungsi ekologis tetapi juga fungsi sosial sebagai tempat bersosialisasi masyarakat.

Beberapa tempat yang saat ini banyak dijadikan sebagai tempat bersosialisasi diantaranya adalah Lapangan Saburai milik Korem Gatam, Lapangan Korpri milik Pemerintah Provinsi, dan PKOR Way Halim milik Pemerintah Provinsi. Untuk jelasnya mengenai jumlah, jenis, dan sebaran RTH publik di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.2
Jenis, Luas, dan Sebaran RTH Publik di Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (ha)	Luas RTH Eksisting (ha)	% RTH Eksisting Terhadap luas wilayah
1	Kedaton	457	26,97	5,90%
2	Sukarame	1.475	55,97	3,79%
3	Tanjung Karang Barat	1.064	150,98	14,19%
4	Panjang	1.415	285,27	20,16%
5	Tanjung Karang Timur	269	9,11	3,39%
6	Tanjung Karang Pusat	405	39,70	9,80%
7	Teluk Betung Selatan	402	27,26	6,78%
8	Teluk Betung Barat	1.102	324,99	29,49%
9	Teluk Betung Utara	425	19,22	4,52%
10	Rajabasa	636	13,55	2,13%
11	Tanjung Senang	1.780	2,86	0,16%
12	Sukabumi	2.821	571,75	20,27%
13	Kemiling	2.505	351,82	14,04%
14	Labuhan Ratu	864	7,90	0,91%
15	Way Halim	535	21,64	4,05%
16	Langkapura	736	1,07	0,15%
17	Enggal	349	4,53	1,30%
18	Kedamaian	875	10,27	1,17%
19	Teluk Betung Timur	1.145	545,71	47,79%
20	Bumi Waras	465	19,24	4,4%
JUMLAH		19.722	2.489,80	12,62%

Sumber :. *Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017*

Tabel 4.3
Luas RTH Publik dan RTH Privat Eksisting di Kota Bandar Lampung

No	Jenis	Luas (ha)	Persentase Pemenuhan Eksisting	Standar Kebutuhan (ha)	Selisih (ha)	Keterangan
1	Luas wilayah	19.722		RTH Privat 10% dari luas wilayah		
2	Luas RTH	2.775,39		RTH Privat 20% dari luas wilayah		
3	RTH Privat	289,70	1,47%	1,972,20	1,682,50	Masih kurang
4	RTH Publik	2.489,90	12,62%	3,944,40	1,454,60	Masih kurang
Total Kebutuhan					3,137,10	Masih kurang

Sumber : *Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017*

5. Rencana Pemenuhan

Berdasarkan kondisi eksisting kota, dengan luasan RTH Publik baru sekitar 12,60% dari luas kota, pemerintah kota memiliki beban yang cukup berat dalam memenuhi kewajiban penyediaan RTH 30% dari luas kota. Hasil analisa menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kewajiban untuk menyediakan RTH (Publik) kurang lebih 1.454,60 hektar lagi. Sejatinya jika dilihat dari kondisi fisik alami yang dimiliki, Kota Bandar Lampung memiliki potensi dan peluang yang cukup banyak untuk dapat memenuhi penyediaan RTH tersebut.

Berdasarkan hasil interpretasi peta citra satelit sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa secara keseluruhan komposisi lahan yang belum terbangun di Kota Bandar Lampung masih kurang lebih 50% dari luas kota. Kawasan yang

belum terbangun tersebut secara eksisting masih berupa lahan kosong dengan tutupan vegetasi hijau seperti lahan sawah dan perkebunan. Kondisi seperti banyak dijumpai di sekitar Kecamatan Teluk Betung Barat tepatnya di Kecamatan Batu Putu, sekitar Kecamatan Teluk Betung Timur yaitu di Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Keteguhan, dan Kelurahan Sukarame II, sekitar Kecamatan Sukabumi di Kelurahan Way Gubak, Kelurahan Way Laga, dan Kelurahan Karang Maritim di Kecamatan Panjang.

Selain itu juga banyak dijumpai di Kelurahan Campang Raya di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kelurahan Pinang Jaya, Kelurahan Kedaung, dan Kelurahan Sumber Agung di Kecamatan Kemiling, Kelurahan Sukadanaham di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kelurahan Sukarame di Kecamatan Sukarame, Kelurahan Labuhan Dalam, Kelurahan Way Kandis, dan Kelurahan Tanjung Senang di Kecamatan Tanjung Senang, Kelurahan Rajabasa Raya dan Kelurahan Rajabasa Jaya di Kecamatan Rajabasa, serta di Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu.

B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung

1. Profil Bappeda Kota Bandar Lampung

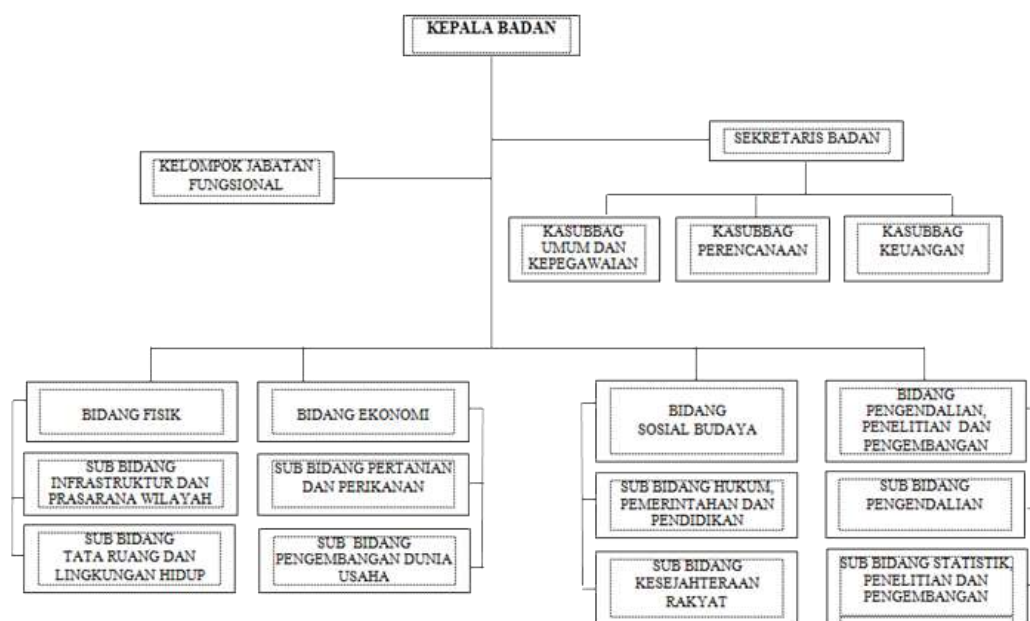
Pada dasarnya Bappeda kota mengintegrasikan perencanaan pembangunan kota dengan fungsi utama Bappeda adalah : a. Perumusan kebijakan, b. Bimbingan konsultasi dan koordinasi, c. Pemantauan dan evaluasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung,

telah diatur dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung dengan struktur :

- a. Kepala Bappeda
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi
 - 2) Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 3) Sub bagian keuangan
 - c. Bidang statistik dan penelitian terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - 1) Sub bidang statistik dan pelaporan
 - 2) Sub bidang penelitian dan pengembangan
 - d. Bidang ekonomi terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
 - 1) Sub bidang produksi dan keuangan
 - 2) Sub bidang pengembangan dunia usaha
 - e. Bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
 - 1) Sub bidang pemerintahan dan sumberdaya manusia
 - 2) Sub bidang kesejahteraan rakyat
 - f. Bidang fisik dan prasarana terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
 - 1) Sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup
 - 2) Sub bidang sarana dan prasarana
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis
- Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis pada Bappeda Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Bandar Lampung

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Bappeda Kota Bandar Lampung diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Bappeda Kota Bandar Lampung. Bappeda sebagai lembaga teknis di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Rincian tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan Perda dimaksud, adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakn daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakn teknis bdidang perencanaan daerah
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi Dan Misi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Visi

a. Aman

Suatu kondisi tercipta dan terjaganya keamanan dan ketertibab masyarakat baik dari gangguan manusia maupun gangguan alam, diukur dari menurunnya tingkat kriminalitas, minimnya tingkat gangguan baik keamanan dan ketertibab dalam masyarakat, meningkatkan penegakan supremasi hukum serta meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap resiko terjadinya bencana alam. Tujuan akhir dari visi ini adalah

menciptakan kondisi yang aman untuk dihuni, aman untuk tempat bekerja dan suasana yang aman dan menarik untuk dikunjungi oleh pendatang

b. Nyaman

Suatu kondisi yang memberikan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi serta lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, diukur dari meningkatnya keselarasan dan konsistensi pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat untuk peningkatan keselarasan antara manusia dan lingkungan serta meningkatkan kenyamanan wilayah kota untuk bermukim dan bekerja. Untuk mencapai visi kota yang nyaman, misi yang hendak diemban oleh Kota Bandar Lampung adalah mampu menyediakan tempat tinggal yang berkualitas, seusia serta terjangkau oleh kemampuan warga kota dan pendatang serta mampu menyediakan dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja yang memadai bagi warga kota dan pendatang

c. Sejahtera

Suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan terus menerus diukur dari beberapa aspek yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat seimbang dengan pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, meningkatnya kesempatan berusaha, berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni di bidang pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

d. Maju

Adalah kondisi masyarakat yang mampu dan cepat dapat menangkap dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan baik di tataran lokal,

nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan adanya kesiapan aparatu pemerintah kota dan masyarakat dalam merespon tuntutan dan perkembangan perubahan lingkungan internal maupun eksternal.

Untuk mencapai kota yang maju, Bandar Lampung perlu meningkatkan diri untuk menciptakan kinerja pelayanan berkualitas internasional. Perkembangan dunia telah menumbuhkan kriteria-kriteria baru dalam tingkat kemudahan bertransaksi, berkomunikasi dan penyelenggaraan transformasi usah maupun aktifitas domestik.

Kinerja pelayanan yang berkualitas dan kompetitif ditunjukan untuk mendukung sektor-sektor yang akan bersaing dalam perekonomian dunia dan regional, sert berfungsi sebagai basis perkembangan Kota Bandar Lampung. Disamping itu, kinerja pelayanan internasional ini juga ditujukan untuk mendukung kualitas kehidupan warga Kota Bandar Lampung.

e. Modern

Adalah kondisi ketersediaan infrastruktur perkotaan yang baik, teratur, aksesibel dan berkelanjutan dalam memberikan dukungan fungsi kota dan peningkatan daya saing berbasis perkotaan. Dalam konteks modern ini, juga mengarah kepada proses pergeseran sikap dan mentalitas pemerintah maupun masyarakat untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai dengan tuntutan masa kini. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa perekonomian dunia semakin menekankan pentingnya kompetisi dan keterbukaan yang mendorong perekonomian Kota Bandar Lampung berhadapan langsung

dengan jaringan dan sistem internasional. Karena itu, Bandar Lampung harus mampu memilih dan mengembnagkan sektor perkotaan yang strategis sebagai basis perekonomian kota serta menyiapkan dan meningkatkan seluruh prasarana pendukung bagi sektor-sektor basis perkotan.

Misi

- a. Mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan perdagangan, berbasis pada ekonomi kerakyatan
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penguasaan iptek dan nilai-nilai ketaqwaan, perkembangan kreatifitas seni dan budaya serta peningkatan prestasi olahraga
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat
- d. Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja birokrasi yang bersih, profesional, berorientasi kewirausahaan dan bertata kelola yang baik
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dengan mengedepankan penataan
- f. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dengan mengedepankan penataan wilayah, pembangunan sarana dan prasarana kota wisata yang maju dan modern

C. Gambaran Umum Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

Pada awalnya untuk menanggulangi masalah sampah di Kota Bandar Lampung ditangani oleh suatu badan yang disebut Badan Pembina Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (BPK3) yang merupakan suatu organisasi yang berada diluar struktur organisasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung Nomor : 21/JK/1972 Jo SK Nomor : 25/HK/1973. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung Nomor : 58/B6.III/HK 1975 maka organisasi Badan Pembina Kebersihan, Ketertiban dan Keindaha (BPK3) dilebur menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung yang diperkuat dengan Perda Nomor 10 Tahun 1976 Tanjung Karang – Teluk Betung yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/006/HK/1977 tanggal 1 Februari 1977.

Dengan adanya Perda Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Tanjung Karang – Teluk Betung, dimana belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 9 ayat 2 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah junto Keputusan Mendagri Nomor 365 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1976 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1985, tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya daerah Tingkat II Bandar Lampung. Dengan adanya Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonomi, dimana kewenangan Kepala Daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri maka disusunlah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung yang diperkuat dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandar Lampung dimana dalam pelaksanaan tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pertamanan, penghijauan, penerangan jalan, dekorasi kota dan pemakaman umum serta melaksanakan tugas lainnya.

Sejalan dengan adanya perubahan terbaru yang dimulai dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. Sedangkan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung diatur didalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang “Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung” adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok
- b. Fungsi
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan, Penghijauan, Penerangan Jalan, Dekorasi Kota dan Pemakaman Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya
- c. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 Dinas Kebersihan dan Pertamanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu dengan 1 orang Sekretaris serta 4 ORANG Kepala Bidang, 12 Kepala Seksi dan 14 orang Kepala UPT dan 14 orang Kepala Tata Usaha UPT.

Tabel 4.4
Jumlah Pegawai sesuai dengan Pangkat/Golongan

NO	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Gol IV	6 orang
2	Gol III	58 orang
3	Gol II	94 orang
4	Gol I	108 orang
5	Tenaga Kontrak	566 orang
Jumlah Total		832 orang

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung 2016

Tabel 4.5
Jumlah Pegawai sesuai dengan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	13
2	S1	45
3	D3	7
4	SMA	81
5	SMEA	4
6	SMK	1
7	STM	4
8	SMP	57
9	SD	54
10	LAIN-LAIN	566
JUMLAH TOTAL		832

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung 2016

Tabel 4.6
Jumlah Pegawai sesuai dengan Tempat Kerja

No	URAIAN	Jumlah Pegawai		
		PNS	Kontrak	Jumlah
1	Sekretariat Dinas	143	247	390
2	UPT Kec. TB Utara	14	23	37
3	UPT Kec. TB Selatan	10	41	51
4	UPT Kec. TB Barat	12	5	17
5	UPT Kec. T.Karang Pusat	14	69	83
6	UPT Kec. T.Karang Barat	5	24	29
7	UPT Kec. T.Karang Timur	7	30	37
8	UPT Kec. Kemiling	4	7	11
9	UPT Kec. Sukabumi	8	7	15
10	UPT Kec. Sukarame	5	10	15
11	UPT Kec. Panjang	7	23	30
12	UPT Kec. Rajabasa	7	24	31
13	UPT Kec. T. Senang	11	5	16
14	UPT Kec. Kedaton	14	27	41
15	UPT TPA Bakung	5	24	29
Total PNS/Kontrak		266	566	832

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung 2016

Tabel 4.7
Jumlah Pegawai sesuai dengan Bidang Tugas

No	URAIAN	Jumlah Pegawai		
		PNS	Kontrak	Jumlah
1	Sekretaris	23	6	29
2	Bidang pertanaman			
	- Staf	6	2	8
	- Petugas lapangan	43	26	69
3	Bidang PJU			
	- Staf	7	-	7
	- Petugas Lapangan	7	5	12
4	Bidang Kebersihan			
	- Staf	7	8	15
	- Petugas Lapangan	6	3	9
5	Bidang Pendapatan			
	- Staf	3	7	11
	- Petugas Lapangan	-	3	3
6	Ka. UPT dan Ka. Tu UPT	26	-	26
7	Staf UPT	16	2	18
8	Kepala Rayon	18	2	20
9	Supir	44	43	87
10	Kenek	49	162	211
11	Petugas TPA	5	24	26
12	Pet. Kebersihan/Sapu/Satgas	3	266	269
13	Pet. Bengkel/Jaga Malam	3	7	10
Total PNS/Kontrak		266	566	832

Sumber :Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung 2016

3. Visi dan Misi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

a. Visi

“Terciptanya Kota Bandar Lampung yang bersih, indah dan sehat dengan partisipasi warganya”

b. Misi

- 1) Pengembangan pelayanan prima dengan pendekatan “sampah hari ini diangkut hari ini”
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kebersihan dan pertamanan kota yang sehat

- 3) Memberdayakan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan pertamanan kota serta ruang terbuka hijau
- 4) Memanfaatkan sampah sebagai barang yang bernilai ekonomis bagi masyarakat
- 5) Melakukan peningkatan jumlah dan kualitas serta penataan terhadap fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan penerangan jalan umum

D. Gambaran Umum Dinas Tata Kota Bandar Lampung

1. Profil Dinas Tata Kota Bandar Lampung

Dinas Tata Kota Bandar Lampung merupakan salah satu bagian dari organisasi perangkat daerah Kota Bandar Lampung. Organisasi Dinas Tata Kota dibentuk melalui Perda Kota Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. Proses penataan struktur organisasi Dinas Tata Kota Bandar Lampung sejak diterapkannya otonomi yang luas (sejak ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Mengingat Kota Bandar Lampung adalah kota lintasan sehingga memiliki dampak terhadap perekonomian lokal. Selain itu, kota ini juga merupakan Ibu Kota Provinsi sehingga menjadi pusat kegiatan Pemerintahan sosial dan politik, ekonomi serta kebudayaan. Dengan demikian perlu dilakukan penataan infrastruktur perkotaan, yang secara fungsional dikelola oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

Proses penataan struktur organisasi Dinas Tata Kota Bandar Lampung, yang meliputi :

- a. Identifikasi kebutuhan
- b. Analisis kebutuhan
- c. Penetapan rancangan struktur organisasi
- d. Penataan struktur organisasi
- e. Finalisasi (penetapan akhir draft struktur organisasi)

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan tugasnya Dinas Tata Kota merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah kota di bidang Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota dan memberikan izin pemanfaatan lahan, penetapan kebijaksanaan kota serta melaksanakan penataan fisik bangunan, pengawasan, pengarahan, dan penertiban terhadap aktifitas atau kegiatan mendirikan bangunan berikut proses perizinannya serta memberikan izin perkotaan, berupa penertiban Surat Izin Tempat Usaha (SITU), izin bangunan (HO) dan perizinan perkotaan lainnya dalam rangka tertib tata ruang kota, tertib bangunan, tertib lalu lintas kota dan tertib administrasi. Perizinan perkotaan yang berwawasan lingkungan, berestetika perkotaan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penataan ruang kota
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Visi Dan Misi

a. Visi

Terwujudnya penataan kota dengan estetika sesuai rencana kota dan pemberian pelayanan publik yang baik.

b. Misi

- 1) Melakukan tertib tata ruang, tertib bangunan yang berestetika perkotaan melalui kebijaksanaan kota yang berwawasan lingkungan berkelanjutan
- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Tata Kota Bandar Lampung
- 3) Melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan peruntukannya
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Dinas Tata Kota Bandar Lampung

E. Gambaran Umum Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH)

1. Profil Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH)

Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung yang sebelumnya bernama Bapedalda merupakan instansi teknis pemerintah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan namanya membidangi masalah lingkungan yang berada di Kota Bandar Lampung dan memiliki divisi pencemaran lingkungan yang dapat memantau tingkat pencemaran yang disebabkan kegiatan pembangunan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdiri dari :

a. Kepala Badan

Kepala BPPLH mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagai urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan walikota.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala badan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian
- c. Pengelolaan urusan keuangan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan menyusun program kegiatan
- 2) Melaksanakan monitoring kegiatan
- 3) Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan saran dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat badan
- 2) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas
- 2) Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya
- 3) Melaksanakan tugas lain yang dibeikan atasan

3. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum linhkungan yang meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi pengawsan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pembinaan dan penegakan hukum lingkungan. Bidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala BPPLH.

Bidang pengawasan pengendalian dan penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaa dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dalam pengawasan pengendalian kerusakan lingkungan hidup

- d. Penyusunan kebijakn teknis penegakan hukum lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring, dalam penegakan hukum lingkungan hidup

Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Penegakan Hukum terdiri dari Sub bidang pengawsan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- a. Sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3
- 2) Menyusun kebijakan teknis pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3
- 4) Menindaklanjuti laporan terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan hidup
- 5) Menindaklanjuti hasil pengawasan lapangan untuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- b. Sub bidang pembinaan dan penegakan hukum lingkungan hidup mempunyai tugas :
- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penegakan hukum lingkungan hidup
 - 2) Menyusun kebijakn teknis penegakan hukum lingkungan hidup
 - 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penegakan hukum lingkungan hidup
 - 4) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum lingkungan
 - 5) Melaksanakan penyidikan kasus lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
 - 6) Melaksnakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pembinaan dan penegakan hukum
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang.

4. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi pelaksanaan teknis, koordinasi penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Bidang penataan dan

pemanfaatan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala BPPLH.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring penataan lingkungan hidup
- c. Penyusunan kebijakan teknis pemanfaatan lingkungan
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring pemanfaatan lingkungan hidup

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Sub bidang penataan lingkungan hidup

Sub bidang penataan lingkungan hidup mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penataan lingkungan hidup
- 2) Menyusun kebijakan teknis penataan lingkungan hidup
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam penataan lingkungan hidup
- 4) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi dalam pembinaan, penerapan, penilaian, evaluasi, pengkajian teknis, AMDAL dan UKL/UPL
- 5) Menyusun kebijakan teknis AMDAL dan UKL/UPL dalam rangka penataan lingkungan hidup

- 6) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penerapan, penilaian, evaluasi pengkajian teknis AMDAL dan UKL/UPL
 - 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan hidup serta AMDAL dan UKL/UPL
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- b. Sub bidang pemanfaatan lingkungan hidup
- Sub bidang pemanfaatan lingkungan hidup mempunyai tugas :
- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pemanfaatan lingkungan hidup
 - 2) Menyusun kebijakan dalam pemanfaatan lingkungan hidup
 - 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam pemanfaatan lingkungan hidup
 - 4) Menyusun petunjuk teknis perizinan dibidang lingkungan hidup
 - 5) Melaksanakan koordinasi, pembinaan perizinan dibidang lingkungan hidup
 - 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup dan perizinan dibidang lingkungan hidup
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

5. Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang konservasi sumber daya alam dan mitra lingkungan hidup meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi, konservasi, rehabilitasi lingkungan hidup dan mitra lingkungan. Bidang konservasi dan mitra lingkungan hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala BPPLH.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang konservasi dan mitra lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan mitra lingkungan
3. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan mitra lingkungan hidup
4. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring pengembangan mitara lingkungan

Bidang konservasi dan mitra lingkungan terdiri dari :

1. Sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam

Sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam serta lingkungan hidup

- b. Menyusun kebijakan teknis konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- d. Menghimpun data untuk pengembangan kawasan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- e. Melaksanakan pengembangan kawasan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam
- g. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2. Sub bidang mitra lingkungan

Sub bidang mita lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan
- b. Menyusun kebijakan teknis pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan
- c. Melaksnakan koordinasi, pembinaan dalam pengembangan potensi kemitraan antara pemerinta dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan tokoh masyarakat dan dunia pendidikan

- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang sosial budaya dan mitra lingkungan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada bidang konservasi dan mitra lingkungan.

6. Bidang Pertambangan dan Energi

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pertambangan dan energi meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi, penelitian dan pengembangan serta pengusaha pertambangan dan energi. Bidang pertambangan dan energi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala BPPLH.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pertambangan dan energi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi
3. Penyusunan kebijakan teknis pengusaha dan pertambangan dan energi
4. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring pengusaha pertambangan dan energi

Bidang pertambangan dan energi terdiri atas :

1. Sub bidang penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi

Sub bidang penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penelitian dan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif
- b. Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif
- d. Menghimpun dan mengolah data potensi pertambangan dan energi serta air bawah tanah
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang penelitian, pengembangan pertambangan dan energi
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2. Sub bidang pengusahaan pertambangan dan energi

Sub bidang pengusahaan pertambangan dan energi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengusahaan pertambangan dan energi
- b. Menyusun kebijakan teknis dibidang pengusahaan pertambangan dan energi

- c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan monitoring dalam perusahaan pertambangan dan energi
- d. Memberikan rekomendasi bidang pertambangan dan energi
- e. Menyusun petunjuk teknis perizinan dibidang pertambangan dan energi
- f. Melaksnakan penetapan royalty pertambnagan dan pajak mineral bukan logam dan bantuan dan air bawah tanah
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perizinan dan perusahaan dibidang pertambnagan dan energi
- h. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

7. Unit Pelaksanaan Teknis

Sampai saat ini Unit Pelaksanaan Teknis yang telah dibentuk adalah Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. UPT tersebut mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan teknis penunjang dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup, kalibrasi, pemeliharaan alat, sarana dan prasarana laboratorium.

Dalam menjalankan tugasnya UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan teknis dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup dan kalibrasi
2. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pemeliharaan alat, saran dan prasarana laboratorium
3. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pembuatan bahan acuan standar, sertifikasi dan bahan uji parameter kualitas lingkungan
4. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pembuatan bahan acuan standar, sertifikasi dan bahan uji parameter kualitas lingkungan
5. Pelaksanaan kerjasama penelitian dibidang lingkungan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi dan UPT Laboratorium lingkungan terdiri dari Kepala UPT, Kepala sub bagian tata usaha dan Kelompok jabatan fungsional. Kepala UPT bertanggung jawab kepada kepala BPPLH Kota Bandar Lampung.

8. Visi Dan Misi

a. Visi

BPPLH Kota Bandar Lampung mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan dan keselarasan pemanfaatan sumber daya alam dengan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

b. Misi

- 1) Melaksanakan penataan dan pengendalian lingkungan hidup
- 2) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- 3) Mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan
- 4) Melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup
- 5) Meningkatkan aksesibilitas informasi sumber daya dan lingkungan hidup
- 6) Mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 7) Meningkatkan fungsi kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat peneliti tarik adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dengan menggunakan teori evaluasi Dunn, ditarik kesimpulan :
 - a. Pada indikator efektivitas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan pengembangan yang dilaksanakan belum sama sekali mencakup keseluruhan jenis kegiatan pengembangan dan kedelapan atribut kota hijau yang menjadi acuan pelaksanaan Program P2KH.
 - b. Mengenai indikator efesiensi pemanfaatan SDM, dapat disimpulkan secara kuantitas SDM yang ada sudah baik dan latar belakang pendidikan aparat pegawai yang ada telah mumpuni, tetapi berbanding terbalik dengan pengetahuan mengenai program P2KH. Sedangkan pada efesiensi biaya program, biaya yang telah digunakan dipakai dengan baik pada beberapa program yang terlaksana tetapi ada program yang menjadi sia-sia karena perancangan yang kurang tepat.

- c. Pada indikator kecukupan, masalah yang ada belum dapat terselesaikan dengan baik (khususnya mengenai RTH seluas 30 %). Hal ini dikarenakan masalah tersebut merupakan asal dicetuskannya RAKH 2013-2017.
 - d. Pada indikator perataan, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa beberapa kegiatan pengembangan yang di laksanakan oleh SKPD terkait belum merata dalam beberapa aspek.
 - e. Mengenai indikator responsivitas, respons masyarakat belum baik. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dari pemerintah dan keikutsertaan masyarakat pada Kophi Lampung belum maksimal.
 - f. Berdasarkan fakta yang ada, pada indikator mengenai ketepatan. Dapat dilihat bahwa masyarakat telah menikmati manfaat Program P2KH walaupun masih banyak Program P2KH yang belum terealisasi.
2. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Bappeda dan SKPD lainnya dalam pelaksanaan Program P2KH adalah melaksanakan agenda rapat koordinasi bulanan dan pelaporan ke Pemerintah Pusat di tiap tahunnya.

B. Saran

- 1. Saran yang dapat diberikan berdasarkan evaluasi program P2KH telah dilaksanakan dengan menggunakan teori evaluasi Dunn adalah :
 - a. Berdasarkan indikator efektivitas, hendaknya kedepan Pemkot Bandar Lampung merancang dan membagi secara jelas kegiatan-kegiatan masing-masing instansi serta di dalamnya tercakup delapan atribut ruang terbuka hijau.

- b. Saran yang lahir berdasarkan indikator efesiensi ialah pada pemanfaatan SDM hendaknya Pemkot Bandar Lampung memberikan pemahaman/pelatihan-pelatihan kepada SDM mengenai pengetahuan P2KH dan mengenai biaya program hendaknya kedepan sebelum diadakannya program, biaya yang digunakan dirancang seefektif mungkin.
 - c. Berdasarkan indikator kecukupan, SKPD yang terkait harus benar-benar berkomitmen tinggi dalam menyelesaikan permasalahan belum tercapainya 30% RTH di Kota Bandar Lampung.
 - d. Pada indikator perataan, kedepannya Pemkot Bandar Lampung harus memperhatikan segala aspek dalam setiap pelaksanaan program.
 - e. Berdasarkan indikator responsivitas, hendaknya Pemkot Bandar Lampung mensosialisasikan lebih instens kedepan kepada mengenai pentingnya RTH dan pelaksanaan Program P2KH di Kota Bandar Lampung (baik *website* pemerintah, seminar-seminar, dan lain-lain).
 - f. Mengenai indikator ketepatan, program-program yang telah dirasakan masyarakat hendaknya dijaga atau *di follow up*, hal ini seperti program Taman Kalpataru yang sudah dirasakan masyarakat dampaknya.
2. Berdasarkan Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Bappeda dalam Program P2KH, saran yang diberikan adalah hendaknya Pemkot Bandar Lampung juga mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan Program P2KH (baik dalam rapat, rembuk dengan masyarakat, dan lain-lain). Sehingga masyarakat juga memahami dan mengerti pentingnya RTH di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Parson, Wayne, 2005. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (versi terjemahan). Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Sulistio, Eko Budi. 2012. *Buku Ajar Kebijakan Publik (Public Policy): Kerangka Dasar Studi Kebijakan Publik*.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS, 2012

_____. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS, 2012

Wibowo, 2009. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Suminar, Ratna. 2015. Koordinasi Antar Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau. Universitas Lampung. Bandar Lampung

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Bandar Lampung

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Rth Di Kawasan Perkotaan

Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025

Website

www.kupastuntas.co/berita-lampung-miskin-rth-.html di akses pada tanggal 27 Januari 2016 Pukul 16.00 WIB

http://www.penataanruang.net/taru/upload/nspk/buku/BUKU_PANDUAN_P2KH.pdf diakses pada tanggal 22 Agustus 2015 Pukul 15.00 WIB

<http://walhilampung.org/?p=874#more-874> diakses pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 19.00 WIB

<http://duajurai.co/2016/08/21/median-jalan-kartini-teuku-umar-bandar->

lampung-dibongkar-pengendara-saya-enggak-perlu-mutar-jauh-lagi/ di akses pada tanggal 02 Februari 2017 pukul 20.00 WIB

http://translampung.com/pot-tanaman-percantik-jalan-gajah-mada/ diakses pada tanggal 02 Februari 2017 pukul 17.00 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung di akses pada 20 Oktober 2016 Pukul 20.00 WIB

http://rudisalam.files.wordpress.com/2010/01/artikulasi-konsep-implementasi-kebijakan-jurnal-baca-agustus-2008, di akses pada 28 januari 2016 Pukul 20.00 WIB

lampost.co/berita/intensitasbanjirdibandarlampungmeni ngkattajam diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 Pukul 20.00 WIB

http://rudisalam.files.wordpress.com/2010/01/artikulasi-konsep-implementasi-kebijakan-jurnal-baca-agustus-2008, di akses pada 28 januari 2016 Pukul 20.00 WIB

Dokumen Lainnya

Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017